

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan tujuan Nasional dan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan pancasila. Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 disadari akan berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga akan berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin. Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan BBM, pemerintah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dapat mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun. Warga masyarakat miskin akan semakin menurun taraf kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi

organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu peran pemerintah adalah peran distribusi, yang mana di dalam peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok warga miskin dengan pemberian subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer / subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif, sehingga hal ini akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga jualnya rendah.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*). Kebijakan baru pengalihan subsidi BBM selain Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS), juga diperuntukan bagi pembebasan biaya pendidikan pada

tingkat tertentu, biaya pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi minyak goreng, subsidi gula dan pembangunan prasarana pedesaan. Kebijakan pengalihan subsidi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Meskipun program kompensasi yang lain tetap berjalan, program BLT adalah program yang kerap kali mendapatkan sorotan.

Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah mulai melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) termasuk didalamnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian pada tahun 2008 Pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni s.d Desember 2008 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (*unconditional cash transfer*).

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) . Program BLT yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 14,1 triliun digunakan untuk pelaksanaan program selama 7 bulan sebesar Rp. 100.000 per bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000 / 3 bulan (Juni-Agustus) dan Rp 400.000 / 4 bulan (September-Desember). Sasarannya Rumah tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil penataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Dengan demikian setiap bulan alokasi dana yang diperlukan adalah sekitar Rp 2 triliun. Sedangkan pada tahun 2009 Bantuan Langsung Tunai yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,7 triliun dibagikan dengan jumlah rumah tangga sasaran yang sama pada tahun 2008 yaitu kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran.. Dana itu hanya diberikan untuk dua bulan yaitu bulan Januari dan

Februari sebesar Rp 100.000 per bulan. Keputusan itu diambil pemerintah pusat mengingat telah terjadi penurunan harga BBM bahkan sampai tiga kali oleh pemerintah.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar; mencegah pengalihan arah pembangunan

untuk kepentingan kelompok berkuasa. Suatu perubahan didalam kondisi ekonomi dikatakan efisien (yaitu meningkatkan kesejahteraan) bila posisi dari seseorang ditingkatkan tanpa merugikan yang lainnya.

Begitu pula dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai ini, dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya penyimpangan – penyimpangan yang terjadi yang tentunya sangat merugikan masyarakat terutama golongan miskin.

Namun seperti yang diberitakan oleh berbagai media, ternyata berbagai aspek mewarnai pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.

Penyaluran dana kompensasi BBM untuk rakyat miskin ternyata penuh penyimpangan. Penyimpangan itu bermacam-macam, antara lain tidak tepat sasaran, satu keluarga mendapat lebih dari satu kupon, banyak rumah tangga miskin yang tidak terdata dan pemotongan oleh oknum ketua RT atau lurah..

Kemudian pendapat sebagian masyarakat mengenai program BLT yang disalurkan pemerintah tidak efektif dan tidak memberikan manfaat kepada keluarga miskin. Karena, pemberian uang tunai seperti BLT, tidak mendidik dan tidak menjadikan keluarga miskin produktif.

Kemudian kebijakan BLT ini memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Di beberapa daerah terjadi aksi pengrusakan lantaran satu KK mendapat dan KK yang lain tidak. Konflik yang dipicu dari rasa saling iri menghasilkan amukan massa yang cukup dahsyat. Amukan yang dilakukan massa maupun individu membawa korban jiwa dan fisik desa. Kemudian terdapat pula Ratusan rumah tangga sasaran penerima bantuan langsung tunai yang terlalu lama mengantri mengakibatkan terjadinya aksi saling dorong sehingga banyak

warga yang tidak sadarkan diri bahkan ada yang meninggal dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran BLT di Indonesia selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Kelurahan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pertama-tama dasar yang menjadi alasan pengambilan sampel di Provinsi Lampung, karena berdasarkan data tahun 2008 dan 2009 provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang cukup banyak penduduk miskin yang mencapai jumlah penduduk sebesar 15.883.000 penduduk dengan persentase sebesar 20,22% penduduk miskin bahkan jumlah tersebut yang paling besar di pulau Sumatra di tahun 2009. Kemudian dasar yang menjadi alasan penelitian dilakukan di kota Bandar Lampung dikarenakan Bandar Lampung sendiri merupakan ibu kota dari provinsi Lampung, yang mana di daerah ini merupakan pusat kegiatan-kegiatan pemerintah dan kegiatan-kegiatan lain termasuk perekonomian. Selain itu Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan nasional dan merupakan pusat pengembangan antar daerah. Namun di bandar Lampung sendiri ternyata masih terdapat cukup banyak penduduk miskin, terbukti dari penyaluran BLT di Kota Bandar Lampung yang diperuntukkan untuk 58.862 RTS, menunjukkan masih adanya penduduk yang kurang mampu di daerah tersebut.

Kemudian penelitian di lakukan di wilayah Kecamatan Sukarame, dasar yang menjadi alasan pengambilan sampel di daerah tersebut karena Sukarame merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung yang menerima BLT yang cukup banyak yaitu sebesar 3288 RTS pada tahun 2008. Hal

ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, buruh dan pedagang, dengan pendapatan rendah, di samping itu pula banyak terdapat rumah tangga miskin yang sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian dasar yang menjadi alasan di pilihnya sampel di Kelurahan Way Halim Permai sendiri dikarenakan masyarakat daerah tersebut mayoritas berpendapatan cukup tinggi atau tergolong orang yang berkecukupan, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui apakah efektif dan tepat sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di salurkan di daerah tersebut dan bagaimanakah pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pra survei di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame terjadi beberapa penyimpangan dalam pendataan masyarakat yang tergolong miskin yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), masalah yang ditemukan adalah seperti banyaknya masyarakat yang menuntut untuk didata sebagai rumah tangga penerima BLT walaupun bukan masuk kategori rumah tangga miskin. Serta banyak penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdata di Kelurahan Way Halim Permai yang bukan termasuk warga daerah tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap pihak kelurahan yang mengatakan bahwa jumlah rumah tangga miskin tahun 2008 di Kelurahan Way Halim Permai adalah sebanyak 414 rumah tangga, akan tetapi bantuan langsung tunai yang dicairkan diperuntukan untuk 591 rumah tangga. Selain itu, minimnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program menyebabkan banyak masyarakat kurang paham tentang kriteria penerimaan BLT ini sehingga dalam pendataan ada yang tidak terdata yang menyebabkan adanya ketidak tepatan sasaran dalam pemberian bantuan tersebut.

Adapun jumlah KK dan RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima BLT yang terdapat di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada periode 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah KK dan RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima BLT di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2008

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah RTM Penerima BLT	Persentase (%)
1.	Way Dadi	3.192	736	23,05
2.	Gunung Sulah	2.692	778	28,90
3.	Sukarame	4.086	629	15,39
4.	Harapan Jaya	2.323	554	23,84
5.	Way Halim Permai	1.742	591	33,92
	Jumlah	14.035	3288	25.02

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung

Tabel 1 memperlihatkan jumlah sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Sukarame tahun 2008 tersebar di 5 kelurahan.

Setiap kelurahan mempunyai jumlah rumah tangga miskin yang berbeda-beda.

Kelurahan Gunung Sulah sebagai daerah penerima bantuan langsung tunai yang tertinggi dan Kelurahan Harapan Jaya yang terendah. Pada tahun 2008 jumlah total penerima Bantuan Langsung Tunai di wilayah Kecamatan Sukarame adalah sebesar 3288.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, Program BLT pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban

yang berat dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah satu faktor krusial dari program BLT ini adalah penentuan kriteria rumah tangga miskin. Dari keterangan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa indikator awal yang digunakan adalah tingkat pendapatan orang miskin atau dikenal dengan garis kemiskinan. Dengan menggunakan definisi BPS, pemerintah menyatakan bahwa seseorang disebut mendekati miskin dan berhak memperoleh dana BLT jika memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 175 ribu per bulan. Tentunya angka ini merupakan angka rata-rata dari pendapatan seluruh anggota rumah tangga, sehingga jika dikembalikan kepada definisi dari rumah tangga miskin, maka angka ini perlu dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang diasumsikan sama dengan 4 orang. Implikasinya, rumah tangga dikatakan mendekati miskin dan memperoleh dana BLT jika memiliki pendapatan kurang dari Rp 700 ribu per bulan.

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan target rumah tangga penerima bantuan. Selain itu, terdapat 14 indikator yang ditanyakan dalam survey BPS. Syarat menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbilang cukup sulit. Agar dapat menerima kartu BLT, rumah tangga yang disurvei harus memenuhi minimal sembilan dari 14 persyaratan yang telah dibuat.

Sebuah rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi variabel antara lain, luas lantainya kurang dari delapan meter persegi/orang dengan jenis lantai tanah, bambu, atau kayu murahan. Dinding yang digunakan terbuat dari bambu, rumbia, atau bahan berkualitas rendah lainnya. Rumah yang tidak memiliki fasilitas WC

dengan sumber air minum dari sumur atau air tidak terlindung, serta penerangannya bukan listrik, juga dikategorikan rumah tangga sasaran (RTS).

Variabel penentu RTS lainnya adalah konsumsi daging atau susu minimal satu kali seminggu. Warga dapat dikategorikan miskin jika frekuensi makannya dalam sehari maksimal hanya dua kali dan hanya membeli pakaian satu stel setahun. Petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektare, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, atau pekerjaan lain dalam sebuah rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp600 ribu juga menjadi penilaian memperoleh BLT.

Program BLT ini bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima manfaat dari subsidi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya rumah tangga miskin apabila pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Mekanisme tersebut menyangkut administratif, organisasi pelaksanaan, sampai pada keefektifitas pelaksanaannya.

Beberapa contoh permasalahan yang ada, merupakan bukti bahwa pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Masalah yang lahir tentunya tidak bisa dijadikan ukuran efektif atau tidaknya pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak yang meragukan keefektifan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT). Dalam penelitian ini efektivitas diukur berdasarkan 3 aspek yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu pendistribusian.

Berdasarkan latar Belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul ”EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP RUMAH TANGGA MISKIN (Studi Kasus : Penerima BLT di Kelurahan Wayhalim Permai Kecamatan Sukarame Tahun 2008/2009) ”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

” Bagaimanakah efektivitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008/2009 di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame?”

C. Tujuan Penelitian

”Untuk mengetahui efektivitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008/2009 di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame.”

D. Kerangka Pemikiran

Kenaikan harga BBM memiliki implikasi besar bagi kehidupan penduduk miskin karena selalu diikuti oleh naiknya kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM tentu semakin mempersulit kehidupan, walaupun hanya untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran kian meningkat sebagai kosekuensi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Hal ini membawa dampak yang cukup besar bagi ketercukupan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu peran pemerintah yang sangat penting adalah peran distribusi. Peran distribusi merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar (Dumairy, 1996;158). Dalam hal ini, peran distribusi ini terwujud melalui peran pemerintah dalam pemberian bantuan langsung tunai terhadap rumah tangga miskin. Pengeluaran negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan disebut transfer pemerintah (*goverment transfer payment*).

Wujud nyata dari orientasi RPJM ini dan didorong oleh membengkaknya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar Internasional, yang tentu pula mempengaruhi harga BBM dalam negeri sejak awal Maret 2005, kemudian mempengaruhi juga kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari (Sembako), yang pada gilirannya memperlemah daya beli masyarakat.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Sasaran utama penerima BLT periode pertama terdiri dari 19,1 juta Keluarga tersebut terdiri atas Keluarga Sangat Miskin dan Keluarga Miskin serta 5-7 juta PNS/TNI/Polri golongan rendah, terutama golongan satu dan dua. Menteri Keuangan menekankan agar pengucuran BLT ini dapat diterima oleh orang yang benar-benar tepat. Walaupun nantinya kebijakan ini tidak 100 persen mampu melindungi masyarakat miskin namun diupayakan pemerintah tetap bisa menjaga daya beli masyarakat.

Agar *good governance* dapat tercapai diharapkan lembaga pengawas dan pemeriksa berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemeriksa telah tertata dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki teknik pengawasan dan pemeriksaan untuk mengukur keefektivan dari program tersebut. seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003 : 218) mengenai tujuan dari audit efektivitas adalah untuk menentukan :

1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan/manfaat yang telah ditetapkan.
2. Efektivitas kegiatan pelaksanaan program
3. Apakah entitas yang telah diaudit telah mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Untuk pelaksanaan BLT secara keseluruhan, nantinya pemerintah diharapkan memberikan laporan pertanggung jawaban oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga bisa diketahui apakah pelaksanaan kali ini sudah benar benar seperti yang diharapkan. Hal tersebut diperlukan mengingat besarnya dana yang digunakan untuk program BLT ini.

Program BLT ini bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima manfaat dari subsidi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya rumah tangga miskin apabila pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu program. Dalam hal ini efektivitas diukur dengan melihat 3 aspek yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran/pendistribusian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini diuraikan dalam lima bab yang meliputi:

- I. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.
- II. Tinjauan pustaka, mengenai teori-teori, temuan, bahan penelitian lain yang diperoleh dari pedoman yang dijadikan acuan untuk penelitian.
- III. Metode penelitian meliputi alat analisis dan gambaran umum kelurahan Wayhalim Permai.
- IV. Hasil perhitungan dan pembahasan
- V. Simpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem sosialis atau sistem kapitalis, pemerintah selalu mempunyai peranan penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis, tetapi sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti sistem kapitalis yang digambarkan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi yaitu :

- 1). Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan;
- 2). Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan;
- 3). Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar yaitu :

1. Peran Alokasi

Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan

digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

2. Peran Distribusi

Yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Menyangkut peran distribusi ini yang harus dilakukan pemerintah adalah :

a. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien

b. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

- Perpajakan
- Subsidi
- Pengentasan kemiskinan
- Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
- Bantuan pendidikan
- Bantuan kesehatan, dll

3. Peran Stabilisasi

Yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai alat stabilitas perekonomian. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak

swasta / perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:

1) Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.

2) Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif:

- inflasi terkendali
- sistem keamanan terjamin
- kepastian hukum terjaga

B. Pengeluaran Pemerintah

1. Tolak Ukur Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Negara merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam melaksanakan fungsi alokasinya. Ada beberapa tolak ukur untuk melihat seberapa besar peran pemerintah dalam suatu perekonomian. Tolak ukur tersebut yaitu :

1. Pengeluaran pemerintah
2. Besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah
3. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor public
4. Jumlah unit organisasi pemerintah
5. Perkiraan beban yang ditanggung oleh individu masyarakat akibat peperpu.

Pengeluaran Negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan suatu pemerintah dan prioritas kegiatan yang dipihnya (Nudjaman A, 1992:11).

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah ($G = \text{Government Spending} / \text{Expenditure}$) pada dasarnya meliputi belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan (untuk daerah-daerah)

Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar (T. Gilarso, 2004:29)

I. Belanja pemerintah pusat, yang dirinci meliputi:

a Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah. Terdapat 5 jenis pengeluaran (belanja) rutin :

- Belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uan jalan, dll)
- Belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll)
- Subsidi daerah otonom
- Bunga dan cicilan hutang (dalam negeri dan luar negeri)
- dan lain-lain (seperti pengeluaran untuk pemilu, upah pungut pajak, PBB, pembayaran jasa giro dan lain-lain).

b. Pengeluaran pembangunan yaitu yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi di bidang industri, pertanian, perhubungan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dll. Pengeluaran pembagunan sebagian besar digolongkan sebagai investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan.

II. Dana Berimbang, yaitu subsidi kepada daerah melalui yang disebut Dana Bagi Hasi dan Dana Alokasi umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK)

Melalui pengeluaran ini pemerintah ikut serta dalam arus uang dan arus barang atau jasa dan dengan demikian dapat mempengaruhi seluruh kegiatan kehidupan ekonomi.

3. Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*).

Kemudian menurut M. Suparmoko (2003:34), subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).

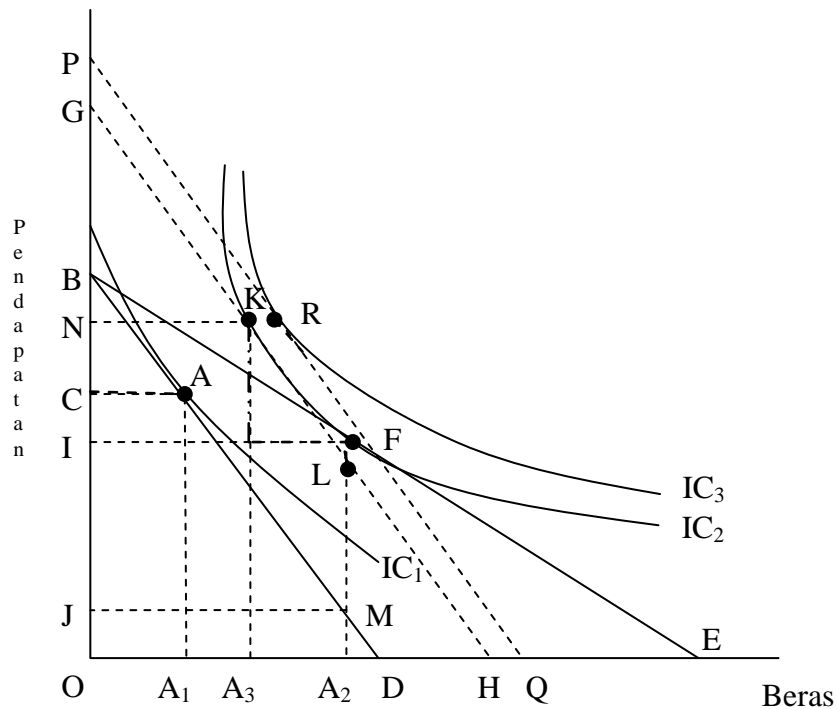
a. Subsidi dalam Bentuk Uang

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang.

Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen:

1. Kepuasan yang diperoleh masyarakat bisa lebih maksimal karena dengan adanya subsidi tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta tidak membatasi pilihan masyarakat/konsumen akan suatu barang
2. Jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi uang tersebut jauh lebih kecil ketimbang subsidi barang.

Misalkan Pemerintah ingin menolong rakyatnya (konsumen) untuk dapat membeli beras dengan harga yang 50% lebih rendah dan yang 50%-nya dibayar oleh pemerintah agar program tersebut tidak merugikan para petani. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini (Gambar 1)



Gambar 1. Pergeseran kurva tak acuh yang menggambarkan kepuasan konsumen terhadap pemberian subsidi oleh pemerintah

Keterangan :

- A = Jumlah beras yang dikonsumsi
- IC = Indifference curve
- IJ = Subsidi yang ditanggung oleh pemerintah
- BD = Garis Anggaran
- GH = Pergeseran garis anggaran
- BG = Kenaikan pendapatan konsumen karena subsidi

Pada gambar 1, sumbu vertikal menunjukkan banyaknya pendapatan per kesatuan waktu, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan banyaknya beras per kesatuan waktu. Dengan pendapatan dan harga beras yang tertentu, seorang konsumen individu itu berada dalam keadaan keseimbangan pada titik A, dimana ia

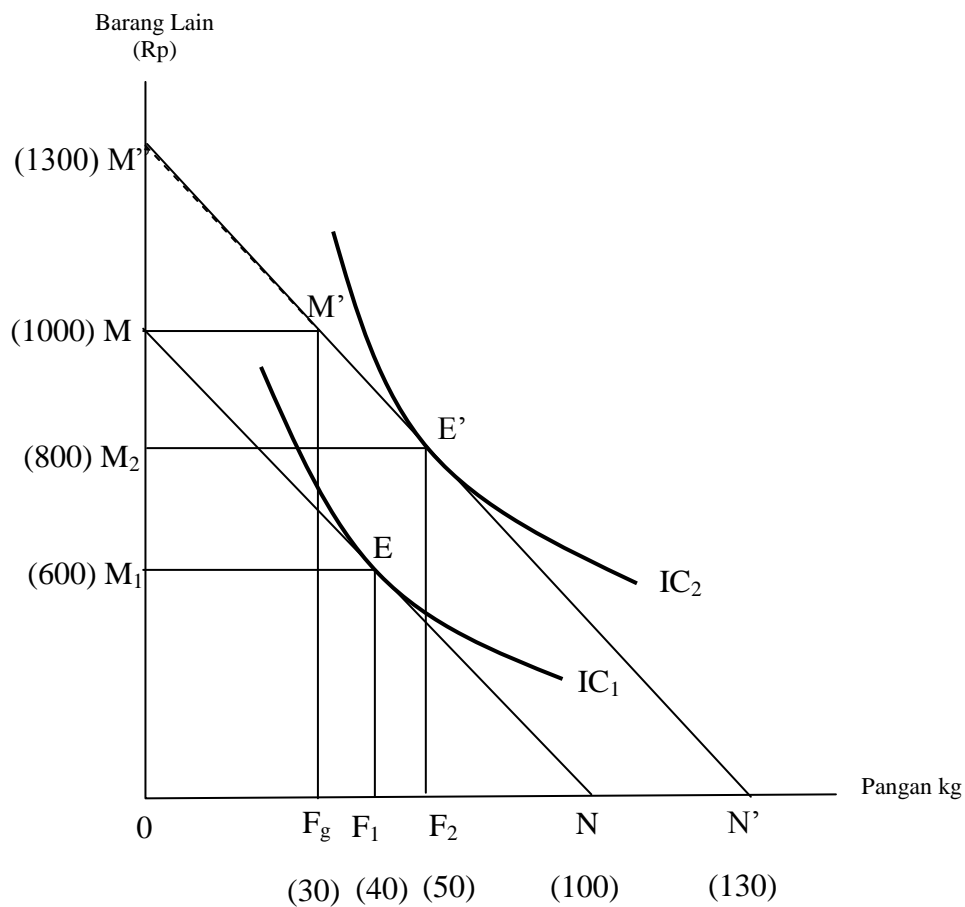
mengonsumsi beras sebanyak OA_1 , dan membelanjakan pendapatannya sebanyak BC . Bila tanpa program pemerintah dalam bentuk subsidi penurunan harga, maka kalau konsumen ingin membeli atau mengonsumsi beras sebanyak OA_2 , berarti konsumen itu harus membayarkan pendapatannya sebesar BJ . Jadi besarnya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar $BJ - BI = IJ$.

Dari gambar 1 kita dapat lihat bahwa $BG < IJ$. Hal ini karena $BD \parallel GH$, maka $BG = LM$, karena $LM < FM$ dan $FM = IJ$, maka $BG < IJ$. Oleh karenanya dapat kita simpulkan bahwa biaya subsidi dalam bentuk penurunan harga lebih besar daripada subsidi dalam bentuk uang pada konsumen.

b. Subsidi dalam Bentuk Barang

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar. Pengaruh subsidi barang (*innatura*) adalah:

1. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi total bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2 .



Gambar 2. Pergeseran kurva tak acuh yang menggambarkan bahwa subsidi mengurangi jumlah pembelian konsumen

Keterangan :

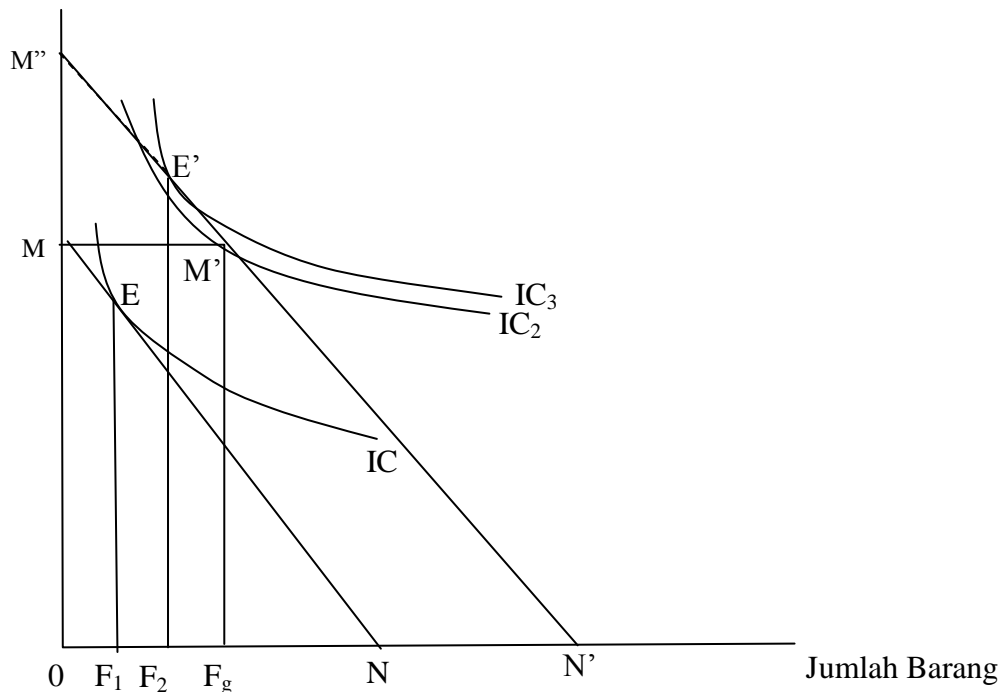
- E = Keseimbangan Konsumen sebelum ada subsidi
- F = Kuantitas Pangan yang dikonsumsi
- M = Barang lain
- MM'M' = Garis Anggaran
- E' = Keseimbangan baru
- IC = Indifference Curve

Gambar 2 menunjukkan sebelum ada subsidi keseimbangan konsumen pada titik E, dengan kuantitas pangan yang dikonsumsi sebesar F_1 , dan barang lain sebesar M_1 . Pemerintah memberikan subsidi pangan sebesar OF_g tanpa harga, tetapi konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut. Ini berarti konsumen dapat mengkonsumsi OF_g tanpa mengurangkan

pendapatnya. Garis anggaran menjadi $MM'N'$, hal ini disebabkan oleh pemberian subsidi oleh pemerintah sebesar OF_g , dimana $MM' = OF_g$. Garis anggaran menjadi $MM'N'$ karena konsumen tidak boleh menjual kembali barang yang disubsidikan yang telah diterimanya tadi. Oleh karena itu garis anggaran bukan $M''M'N'$ tetapi $MM'N'$. Keseimbangan baru ada di titik E' . Pembelian barang yang diberi subsidi (pangan) sesudah ada subsidi hanya sebesar F_1F_2 yang lebih kecil dari OF_1 . Ini berarti ada pengurangan pembelian oleh konsumen terhadap jenis barang yang diberikan sebagai subsidi. Dalam contoh angka $F_gF_2 = 20$ dan $OF_1 = 40$. Tetapi konsumsi keseluruhan meningkat dari OF_1 menjadi OF_2 .

2. Tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah disamping memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi. Pada gambar 2 garis anggaran setelah ada subsidi adalah $MM'N'$, dengan titik keseimbangan pada titik E' . Kemudian pemerintah mengenakan pajak yang sama besarnya dengan subsidi, yang akan menggeser garis anggaran ke MN , dengan titik keseimbangan kembali ke E . Maka jumlah konsumsi barang yang diberikan sebagai subsidi tetap tidak berubah.
3. Konsumsi menjadi terlalu tinggi (*overconsumption*), hal ini terjadi jika jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya yang tersedia untuk dibeli konsumen, misalkan suatu keluarga dengan 2 orang anak disubsidi rumah dengan 3 kamar tidur. Padahal kalau subsidi dalam bentuk uang, keluarga itu hanya akan menggunakan rumah dengan 2 kamar tidur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

Barang Lain



Gambar 3. Pergeseran kurva tak acuh yang menunjukkan bahwa subsidi dapat meningkatkan konsumsi.

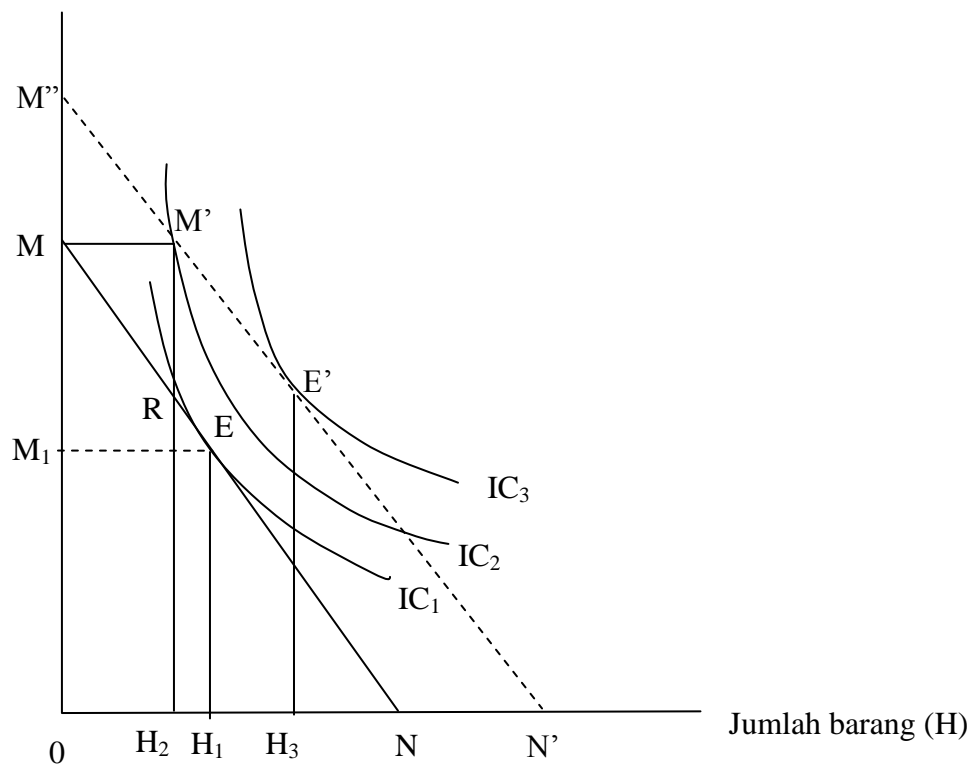
Keterangan :

- E = Keseimbangan Konsumen sebelum ada subsidi
- F = Kuantitas Pangan yang dikonsumsi
- M = Barang lain
- MN = Garis Anggaran sebelum subsidi
- M'N' = Garis Anggaran sesudah subsidi
- E' = Keseimbangan baru
- IC = Indifference Curve

Pada gambar 3 terlihat bahwa sebelum subsidi anggaran MN, dengan keseimbangan pada titik E. Jumlah yang dikonsumsi OF_1 . Kemudian pemerintah memberi subsidi yang akan menggeser garis anggaran menjadi $MM'N'$, jumlah yang dikonsumsi Of_g , yakni sebesar jumlah barang yang disediakan oleh pemerintah. Andaikan ada subsidi uang senilai subsidi MM' . Garis anggaran menjadi $M''M'N'$, dengan keseimbangan pada E' , dan jumlah yang dikonsumsi sebesar OF_2 . Maka ini berarti ada kelebihan konsumsi (over consumption) sebesar F_gF_2 .

4. Konsumsi menjadi terlalu rendah (*underconsumption*), hal ini terjadi kalau jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah yang diharapkan oleh konsumen, misalkan pemerintah menyediakan rumah bersubsidi tipe 36 dengan 2 kamar tidur saja padahal yang dibutuhkan konsumen rumah dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

Barang Lain



Gambar 4. Pergeseran Kurva Tak Acuh yang Menggambarkan Subsidi dapat Menurunkan Konsumsi

Keterangan :

- E = Keseimbangan Konsumen sebelum ada subsidi
- H = Jumlah Barang
- M = Barang lain
- MN = Garis Anggaran sebelum subsidi
- M'N' = Garis Anggaran sesudah subsidi
- E' = Keseimbangan baru
- IC = Indifference Curve

Gambar 4 menunjukkan sebelum ada subsidi dalam bentuk barang, konsumen mengkonsumsi sebanyak OH_1 dengan keseimbangan pada titik E, yaitu persinggungan antara kurva tak acuh IC , dan garis anggaran MN . Kemudian pemerintah memberikan subsidi barang sebesar $OH_2 MM'$, sehingga mengubah garis anggaran $MM'N'$, konsumen berada pada titik keseimbangan dan konsumen mengkonsumsi OH_2 . Andaikan konsumen mempunyai uang tunai senilai subsidi itu dia berkeinginan untuk mengkonsumsi barang sebesar OH_3 . Ini berarti pemerintah menyediakan subsidi in natura terlalu kecil. Dengan adanya subsidi dalam bentuk barang ini akan berarti ada pengurangan jumlah dikonsumsi sebesar H_1H_2 . Dengan mengkonsumsi barang sebesar OH_3 , konsumen menjadi lebih baik karena berada pada kurva tak acuh IC_3 yang lebih tinggi dibanding dengan subsidi barang maupun tanpa subsidi. Jadi terdapat konsumsi yang terlalu rendah sebesar H_2H_3 . Hal ini disebabkan, apabila konsumen mempunyai uang tunai, maka jumlah yang dikehendaki adalah sebesar OH_3 dan kalau subsidi barang, jumlah yang dikonsumsi hanya OH_2 . Dengan kata lain konsumen tidak mampu membeli tambahan barang tersebut kecuali yang disubsidi oleh pemerintah.

Menurut Davey yang dikutip dalam Wahyu Ismoyo (2008:17-18) tujuan subsidi adalah :

1. Membiayai sebagian/seluruh biaya penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan sosial.
2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program pembangunan dan pelayanan sehingga sejalan dengan kebijaksanaan nasional.
3. Menyokong pertumbuhan daerah.

C. Definisi Kemiskinan

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti "tidak berharta benda". Secara lebih luas kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok yang dengan kondisi tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang lain.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Menurut Chambers yang dikutip oleh Britha Mikkelsen (2003:194) kemiskinan merupakan suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan yaitu suatu keadaan minus (*deprivation*) hal tersebut berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Sedangkan kemiskinan menurut Kartasmita (1993 : 34) adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan hanya karena dikehendaki oleh si miskin,

melainkan karena tidak bias dihindari dengan kekuatan yang apa adanya.

Kemiskinan moral, kemiskinan ilmu pengetahuan atau kemiskinan materiil.

Namun untuk menyederhanakan pendekatan dalam mengatasinya, kita batasi arti kemiskinan pada kemiskinan materiil yang diukur dengan rendahnya tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh BPS (2007 : 5-8) adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan Relatif : merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan Absolut : ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
3. Kemiskinan Struktural : yaitu kemiskinan yang menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil.
4. Kemiskinan Kultural : yaitu diakibatkan oleh faktor-faktor adaptasi dan kebudayaan suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.

Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan.

Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan (Badan Pusat Statistik).

Dari beberapa pengertian kemiskinan tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana sejumlah atau sekelompok orang yang mengalami situasi dimana pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tidak terpenuhi yang dilator belakanginya oleh ketidak mampuan dalam bidang ekonomi, baik dari segi materi maupun non-materi yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam kelompok masyarakat.

Kemiskinan dapat berakibat antara lain :

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat
3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Kemungkinann merosotnya mutu generasi

Strategi Bank Dunia dalam penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Britha Mikkelsen (2003:192) yakni :

1. Membuka kesempatan ekonomi untu golongan miskin
 - Mengembangkan pertumbuhan padat-karya
 - Meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan kecil dan petani kecil
2. Investasi dalam sumber daya manusia
 - Memfokuskan pengeluaran pemerintah pada golongan miskin terutama perbaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan

3. Pemberian jaring pengaman untuk melindungi mata pencaharian
- Dana-dana sosial yakni dana pemerintah untuk menunjang jaring pengaman informal.

D. Pengertian Efektifitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Georgopulos dalam Hessel (2005:169) mengemukakan bahwa efektivitas adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.

Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implicit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai (Fremont E.Kas dalam Sugiyono, 2006:23). Sedangkan Fadel (2008:23) mengemukakan efektivitas yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan social dan ekonomi yang dihadapi, baik dalam arti ketepatan pencapaian *output*, maupun pencapaian *income*.

Secara umum efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. Efektifitas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan suatu keberhasilan

suatu program atau rencana. Tujuan menjadi indikator dalam menentukan efektifitas, oleh karena tujuan dari suatu program harus jelas agar pada akhirnya dapat diketahui apakah rencana dari suatu program tersebut telah terlaksana.

Hessel (2005:139) mengemukakan 2 aspek yang menyangkut efektivitas:

1. Tujuan Organisasi
2. Pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan tersebut

Permasalahan yang sering muncul dalam konsep efektivitas adalah didalam pendefinisian konsep, hal ini ditandai dengan banyaknya pendekatan sebagai alat ukur yang digunakan untuk melihat efektivitas. Gibson dalam Hessel (2005:141) mengemukakan 7 ukuran dalam mengukur efektivitas antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

F. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian

BLT merupakan salah satu jaringan pengaman sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak kenaikan BBM bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan Langsung Tunai atau *cash transfer* merupakan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin berupa uang tunai.

2. Tujuan

Tujuan dari program bantuan langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

3. Sasaran

Penerima bantuan langsung tunai adalah rumah tangga sasaran sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran hasil pendataan BPS. Yang meliputi rumah tangga sangat miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*), dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.,

Dari keterangan yang diperoleh penulis, diketahui bahwa indikator awal yang digunakan adalah tingkat pendapatan orang miskin atau dikenal dengan garis kemiskinan. Dengan menggunakan definisi BPS, pemerintah menyatakan bahwa seseorang disebut mendekati miskin dan berhak memperoleh dana BLT jika memiliki tingkat pendapatan di bawah Rp 175 ribu per bulan. Tentunya angka ini merupakan angka rata-rata dari pendapatan seluruh anggota rumah tangga, sehingga jika dikembalikan kepada definisi dari rumah tangga miskin, maka angka ini perlu dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang diasumsikan sama dengan 4 orang. Implikasinya, rumah tangga dikatakan mendekati miskin dan memperoleh dana BLT jika memiliki pendapatan kurang dari Rp 700 ribu per bulan.

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan target rumah tangga penerima bantuan. Selain itu, terdapat 14 indikator yang ditanyakan dalam survey BPS (2007:26), yaitu :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- c. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
- d. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- e. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
- f. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
- g. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
- i. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
- j. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
- k. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
- l. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak,

pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per bulan.

- m. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
- n. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.

4. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran didasarkan pada instruksi Presiden Republik Indonesia Np. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran

5. Mekanisme dan Tahapan Program

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT-RTS adalah :

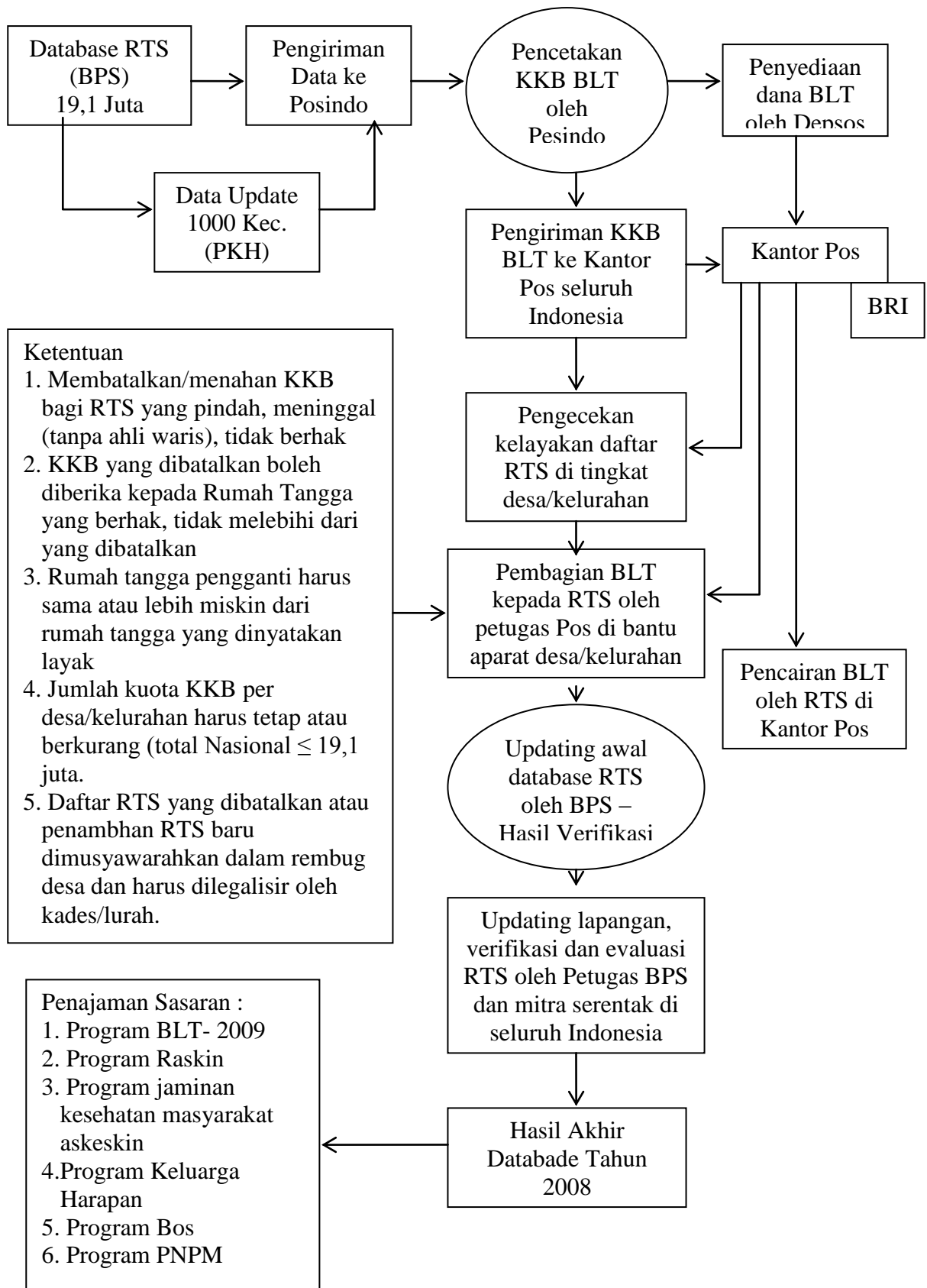
- a. Sosialisasi program bantuan langsung tunai dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Sosial, bersama dengan Kementrian/Lembaga di Pusan bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Penyiapan data rumah tangga sasaran dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS pusat) . Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial, dan PT Pos Indonesia.

- c. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
- d. Pencetakan KKB Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.
- e. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- f. Pengiriman KKB ke Kantor Pos seluruh Indonesia
- g. Pengecekan kelayakan daftar Rumah Tangga Sasaran di tingkat Desa/ Kelurahan.
- h. Penerima Program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT-RTS, sehingga dimasukkan sebagai Rumah Tangga Sasaran yang masuk dalam daftar.
- i. Pembagian KKB kepada Rumah Tangga Sasaran oleh Petugas Kantor Pos dibantu aparat desa/ kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
- j. Pencairan BLT-RTS oleh Rumah Tangga Sasaran berdasarkan KKB di Kantor Pos atau di lokasi-lokasi pembayaran yang telah ditetapkan.
- k. Pembayaran terhadap penerima KKB dilakukan untuk periode Juni s.d Agustus sebesar Rp. 300.000,- dan periode September s.d Desember sebesar Rp.400.000,-. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT. Pos Indonesia.
- l. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dll).
- m. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLTRTS oleh tim terpadu.

- n. Pelaporan bulanan oleh PT. Pos Indonesia kepada Departemen Sosial.
- o. Mekanisme dan tahapan administrasi diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Depsos, PT Pos Indonesia dan PT. BRI, serta Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

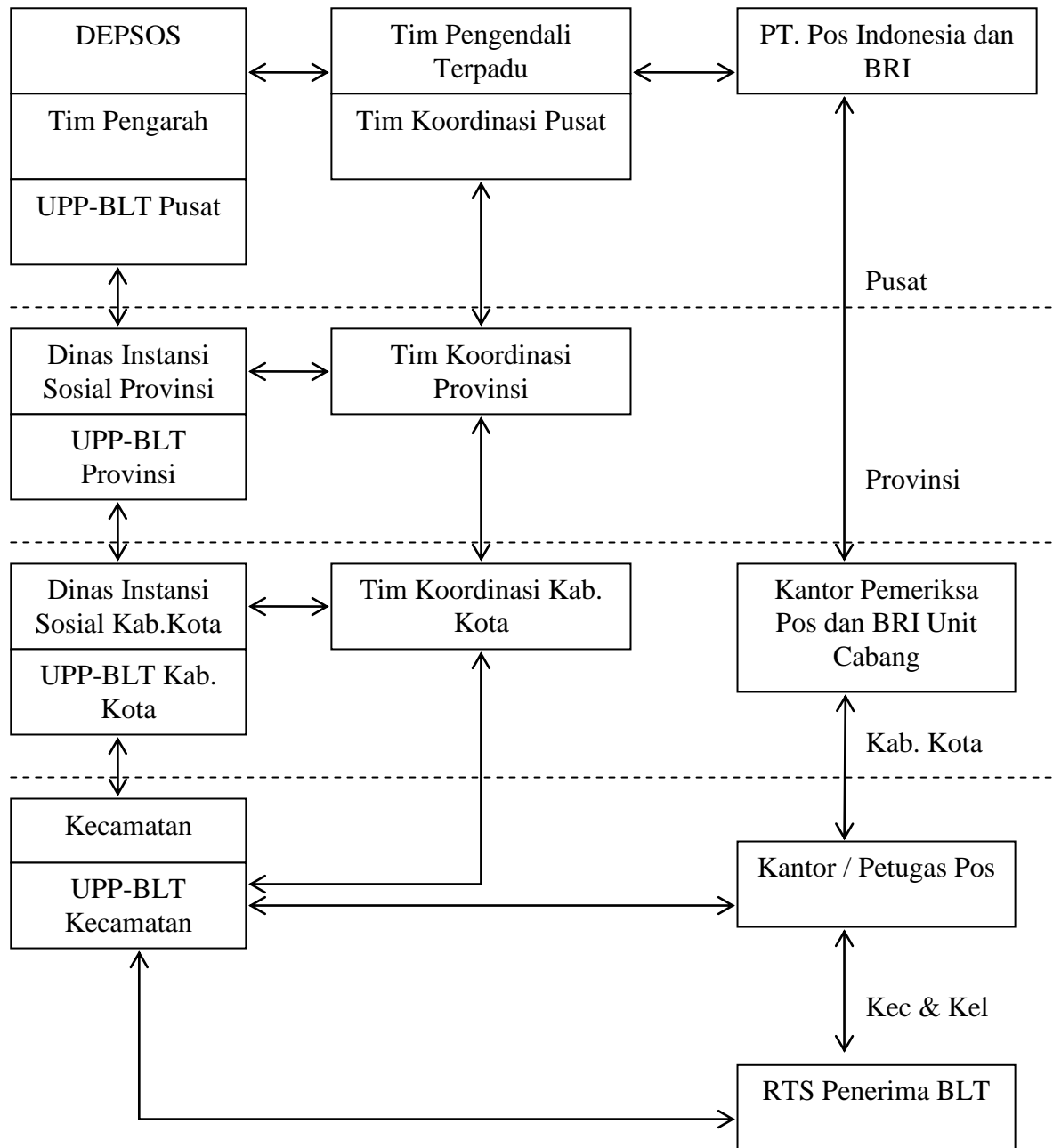
Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-RTS, akan dilaksanakan pemutakhiran data (*updating*) terhadap data Rumah Tangga Sasaran oleh BPS dan mitra yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemutakhiran data tersebut akan digunakan untuk penajaman sasaran Program BLT-RTS tahun 2009, Program Raskin, Program BOS, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Askeskin dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan demikian, pada masa yang akan datang akan tercipta sistem database kemiskinan yang terpadu dan lintas sektor dengan target sasaran yang sama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keberlanjutan dan keterpaduan penanggulangan kemiskinan.

Gambar 5. Skema Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Rumah



(Tim Penyusun Juknis Penyaluran BLT : 15)

Gambar 6. Struktur Organisasi Program Bantuan Langsung Tunai



(Tim Penyusun Juknis Penyaluran BLT : 17)

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung terhadap lurah Kelurahan Way Halim Permai dan juga menyebarkan kuisioner dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur kepada Rumah Tangga Miskin dalam hal ini sebagai objek yang diberikan bantuan langsung tunai. Data yang diperlukan dari penyebaran kuisioner terhadap keluarga miskin adalah :

- a. Identitas responden mengenai pekerjaan dan penghasilan dari penerima manfaat program bantuan langsung tunai (BLT) di Kelurahan Way Halim Permai.
- b. Data mengenai Ketepatan Sasaran Penerima BLT.
- c. Data mengenai Ketepatan Jumlah BLT.
- d. Data mengenai Ketepatan Waktu Penyaluran BLT.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui literatur-literatur, internet, makalah dan dengan cara mencatat langsung dari catatan resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, yaitu Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame.

Data yang diperoleh yaitu :

- a. Data jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Sukarame tahun 2008/2009.
- b. Data jumlah penerima manfaat dan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tahun 2008/2009.
- c. Data jumlah penduduk di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame 2008/2009.
- d. Data sejarah dan monografi Kelurahan Way Halim Permai.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden. Dalam hal ini responden yang dimaksud adalah Lurah Way Halim Permai Kecamatan Sukarame.

2. Dokumentasi

Diperoleh melalui penelitian secara langsung guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yaitu pada PT Pos Cabang Wayhalim Permai, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dan kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame. Kemudian dengan membaca literatur, karya ilmiah, surat kabar, dan media elektronik lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

3. Angket dan kuisisioner

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (angket) kepada responden yang mana alternatif jawabannya telah disediakan (Kuisisioner Tertutup). Dalam hal ini responden yang dimaksud adalah

kepala/anggota keluarga rumah tangga miskin sebagai sasaran penerima bantuan langsung tunai sesuai sampel yang telah ditentukan.

C. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap rumah tangga miskin, penulis menggunakan analisis Deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan secara utuh yaitu dengan menggunakan analisis tabel. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan rumus atau ketentuan matematik/statistik, dengan merubah ke dalam bentuk simbol-simbol atau angka. Jawaban responden pada kuisisioner perlu dirubah dalam bentuk angka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang diperoleh. Efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada penelitian ini dilihat dari ketepatan pendataan RTS, ketepatan jumlah dana BLT, dan ketepatan waktu pendistribusian..

Dalam analisis jawaban responden, dilakukan pengukuran variabel penelitian tentang Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame. Pengukuran setiap item pertanyaan menggunakan skala ordinal, dan setiap item pertanyaan pada kuisisioner dibuat alternatif. Dimana, alternatif jawaban berjenjang dimulai jenjang tertinggi dengan skor 3 dan jenjang terendah dengan skor 1. Jawaban responden pada kuisisioner perlu dirubah dalam bentuk angka-angka untuk mengkuantitatifkan data yang diperoleh, dimana jawaban yang tersedia diberi skor secara berjenjang dari yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk menghitung tepat atau tidaknya ketepatan sasaran suatu aspek pertanyaan dapat dilihat dari beberapa banyak responden yang menjawab

pertanyaan tersebut. Kemudian dihitung skor nilai dari jawaban tersebut dengan ketentuan untuk masing-masing pilihan jawaban yaitu:

- a. Nilai 3 untuk alternatif jawaban (a) yang memiliki kategori tinggi
- b. Nilai 2 untuk alternatif jawaban (b) yang memiliki kategori sedang
- c. Nilai 1 untuk alternatif jawaban (c) yang memiliki kategori rendah

Dasar yang menjadi alasan penulis memilih 3 (tiga) alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan adalah agar hasilnya lebih mudah diolah, kemudian responden lebih merasa yakin akan jawaban-jawabannya tanpa dihadapkan oleh banyak pilihan jawaban, dan tidak menyita banyak waktu untuk menjawab kuesioner tersebut.

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\sum S_{ij} \text{Riil}}{\sum S_{ij} \text{Harapan}} \times 100\%$$

(Nairobi dkk, 2003 : 10)

Keterangan :

i = Variabel ke i

j = Responden ke j

S_{ij} = Skor total untuk variabel i

Tabel 2. Analisis Data

No	Variabel dan item pertanyaan	Total Skor Riil	Total Skor Harapan	% Capaian
A.	Mengenai Ketepatan Pendataan Penerima BLT			
	1. Frekuensi makan dalam sehari 2. Pemenuhan kebutuhan protein (daging/susu/telur) 3. Pembelian pakaian baru 4. Penggunaan fasilitas kesehatan 5. Ukuran luas lantai rumah 6. Keadaan dinding rumah 7. Sumber air minum 8. Penggunaan alat untuk memasak 9. Penggunaan Listrik 10. Pendataan di luar wilayah kelurahan Way Halim Permai 11. Kesalahan pendataan di luar wilayah Way Halim Permai			
B.	Mengenai Ketepatan Jumlah Dana BLT yang diterima RTS			
	1. Kesesuaian jumlah uang yang diberikan 2. Pemotongan jumlah BLT 3. Manfaat BLT 4. Pembagian Jumlah Dana BLT sama rata			
C.	Mengenai Ketepatan Waktu Distribusi			
	1. Ketepatan waktu proses penjadwalan dan pencatatan program BLT dari pemerintah 2. Kesesuaian waktu pemberian KKB 3. Kesesuaian waktu dan tepat penyaluran dana BLT			
D	Mengenai Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai			
	1. Informasi dan Sosialisasi program BLT 2. Pengecekan ketepatan nama-nama RTS yang ada pada BPS 3. Daftar nama penerima BLT 4. Penyediaan fasilitas kotak Pos (PO BOX)			

Kaidah keputusan :

- 75 – 100 = Sangat Efektif
 50 – 74 = Efektif
 24 – 49 = Kurang Efektif
 0 – 24 = Tidak Efektif

Dengan menggunakan kaidah keputusan tersebut di atas, akan diketahui :
Efektivitas Bantuan Langsung Tunai secara menyeluruh, dimana dengan kriteria akan diketahui tahapan mana yang masih lemah

D. Metode Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) karena anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini total rumah tangga miskin penerima BLT di kelurahan Way Halim Permai adalah 591 rumah tangga. Jumlah tersebut berdasarkan data tahun 2008.

$$n = \frac{N \cdot p(1-p)}{(N-1)D + p(1-p)}$$

Keterangan: n = Besar sampel

N = Besar populasi

p = Proporsi yang diduga

$$D = \frac{B^2}{4} \text{ (estimasi terhadap mean)} = \frac{(0,10)^2}{4} = 0,0025$$

B = *Bound of error*

Pada tingkat kepercayaan 90%, maka $B = 0,10$ atau 10%

(M. Nazir, 2003:289)

Nilai P pada umumnya dapat dianggap 0,5 dan $B = 0,1$ (M. Nasir, 2003:289).

Maka besar sampel yang harus diambil adalah :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{591 \cdot 0,5(1-0,5)}{(591-1)0,0025+0,5(1-0,5)} \\
 &= \frac{147.75}{1,725} \\
 &= 85.65 \text{ dibulatkan menjadi } 86
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 86 rumah tangga miskin dari keseluruhan populasi sebanyak 591 rumah tangga miskin. Keseluruhan sampel diambil secara acak yaitu dari Lingkungan I kelurahan Way Halim Permai dikarenakan penerima BLT seluruhnya berasal dari Lingkungan I Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame.

E. Uji Persyaratan Instrumen

a. Uji Validitas

Validitas berkaitan dengan apakah kita mengukur apa yang seharusnya diukur (Asep Hermawan, 2005:126). Suharsimi Arikunto(2006:160) menyatakan bahwa, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran cukup akurat stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total.

Untuk mengukur vailiditas rumus yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus Product Moment sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X^2)\} \{N\sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy}	= Koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y
X	= Skor gejala X
Y	= Skor gejala Y
N	= Jumlah sampel

(Suharsimi Arikunto, 2006:170)

Kriteria pengujian, apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 0,05 dan $dk = n$,

maka alat ukur dikatakan valid sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut tidak valid.

b. Reabilitas

Asep Hermawan mengemukakan bahwa reabilitas berkaitan dengan konsistensi, akurasi dan prediktabilitas suatu alat ukur. Suatu angket dikatakan reliabel jika angket tersebut memiliki taraf kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemampuan dan ketepatan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus alpha sebagai

berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{K}{(k-1)} \right] \left[\frac{1 - \sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan :

r_{11}	= reabilitas instrumen
K	= banyaknya butir pertanyaan
$\sum \sigma_b^2$	= Jumlah varian butir
σ_1^2	= Varians total

(Suharsimi Arikunto, 2006:196)

Jika kita sudah memperoleh angka reliabilitasnya, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan harga tersebut dengan tabel *r product moment*.

Tabel 3. Tabel Interpretasi Reabilitas Instrumen

Besarnya Nilai r_{11}	Kriteria
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang/Cukup
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

F. Gambaran Umum Kelurahan Way Halim Permai

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Way Halim Permai merupakan kelurahan yang memiliki luas 180 Ha. Dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sebesar 750 m, banyak curah hujan sebesar 2300 mm / tahun, dan topografinya adalah tergolong dataran rendah.

Adapun batas wilayah Kelurahan Way Halim Permai yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Perumnas Wayhalim
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sulah dan Kelurahan Jagabaya 3
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kedaton
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Waydadi

2. Aspek Kependudukan

Jumlah Keseluruhan penduduk di Kelurahan Way Halim Permai pada tahun 2008 yaitu sebanyak 9.198 orang, yang terdiri dari 1.742 KK. Sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu menjadi 10.090 orang, yang terdiri dari 1.745 KK. Pembagian penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2008 yaitu yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4633 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 4563 orang dan pada tahun 2009 yaitu yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4892 dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 5202 orang.

Sedangkan untuk jumlah penduduk menurut tingkat mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut Jenis Mata Pencahariannya Tahun 2008

Jenis Mata pencaharian	Jumlah penduduk
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1312
TNI/Polri	111
Dagang	1398
Tani	694
Tukang	256
Buruh	388
Pensiunan	191
Lain-lain	4834

Sumber: Kelurahan Wayhalim Permai 2009

Adapun jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima BLT yang terdapat di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada periode 2008 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima BLT di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2008

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah RTM Penerima BLT	Persentase (%)
1.	Way Dadi	3.192	736	23,05
2.	Gunung Sulah	2.692	778	28,90
3.	Sukarame	4.086	629	15,39
4.	Harapan Jaya	2.323	554	23,84
5.	Way Halim Permai	1.742	591	33,92
	Jumlah	14.035	3288	25.02

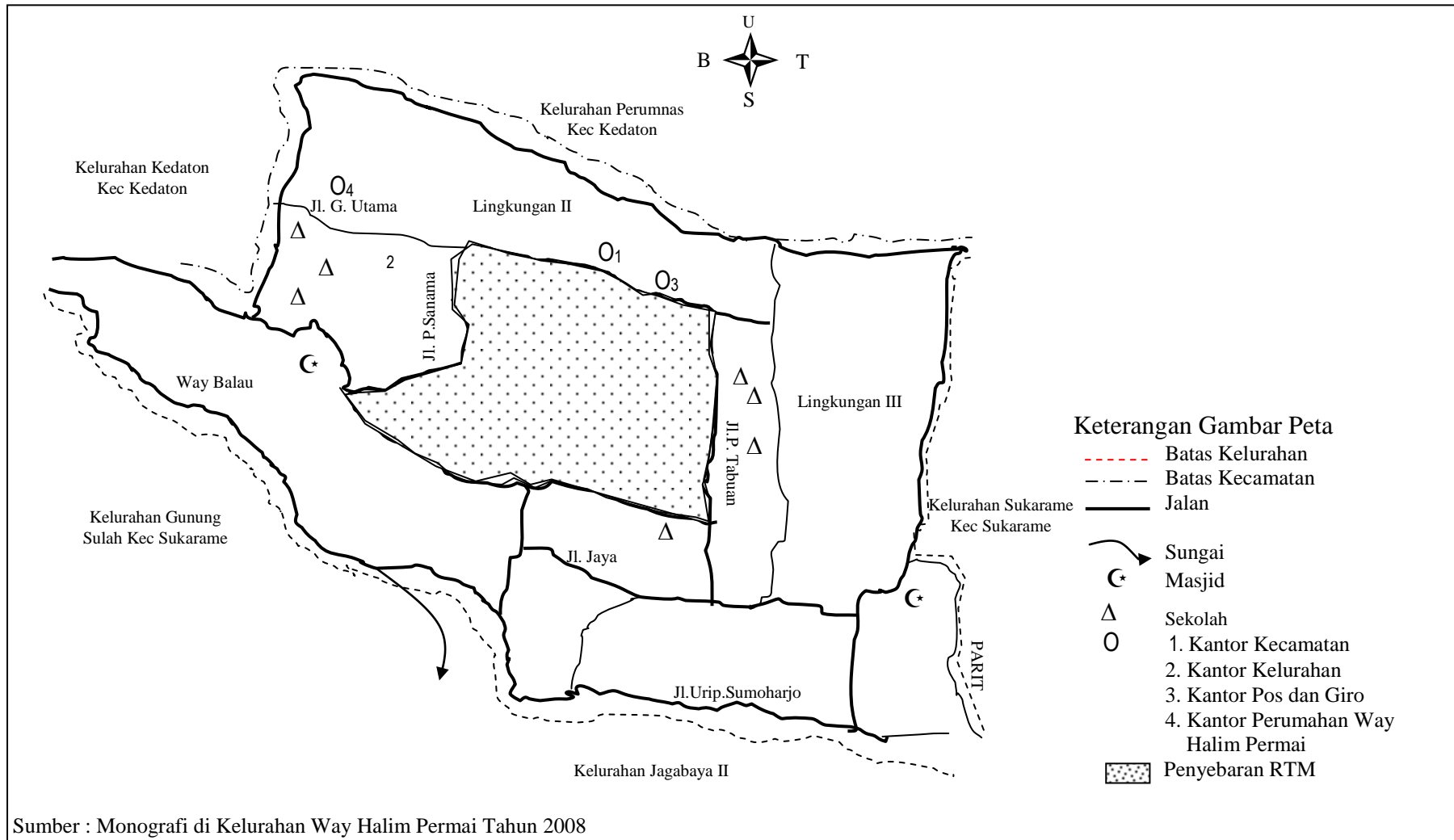
Sumber : BPS Kota Bandar Lampung

Tabel 5 memperlihatkan jumlah sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Sukarame tahun 2008 tersebar di 5 kelurahan.

Setiap kelurahan mempunyai jumlah rumah tangga miskin yang berbeda-beda.

Kelurahan Gunung Sulah sebagai daerah penerima bantuan langsung tunai yang tertinggi dan Kelurahan Harapan Jaya yang terendah. Pada tahun 2008 jumlah total penerima Bantuan Langsung Tunai di wilayah Kecamatan Sukarame adalah sebesar 3288.

Gambar 7. Peta Penyebaran Rts Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dikelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2008/2009



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Berdasarkan sebaran kuisioner terhadap 86 responden yaitu rumah tangga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun klasifikasi responden sebagai berikut :

Tabel 6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	70	81,40
2.	Perempuan	16	18,60
Jumlah		86	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan (Tahun 2009)

Berdasarkan tabel 6 hasil sebaran kuisioner yang dibagikan kepada 86 responden jenis kelamin responden laki-laki adalah sebanyak 70 orang (81,40%), dan perempuan sebanyak 16 orang (18,60%).

Tabel 7. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan, Penghasilan, dan Jumlah tanggungan

No	Pekerjaan	Jumlah (%)	Rata-rata Penghasilan/Bulan (Rp)	Rata-rata Jumlah Tanggungan
1	Petani	5.8	480.000	4
2	Wiraswasta	3.5	620.000	2
3	Sopir	2.5	450.000	3
4	Pedagang	17.5	550.000	3
5	Tukang	4.65	275.000	5
6	Buruh	66	538.000	3

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa 5,8 % sebagai petani, dengan rata-rata penghasilan /bulan sebesar Rp 480.000 dan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 4 orang.

Kemudian sebesar 3,5 % sebagai wiraswasta , dengan rata-rata penghasilan /bulan sebesar Rp 620.000 dan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Selanjutnya sebesar 2,5 % sebagai Supir , dengan rata-rata penghasilan /bulan sebesar Rp 450.000 dan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Sebesar 17,5 % sebagai Pedagang , dengan rata-rata penghasilan /bulan sebesar Rp 550.000 dan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Sebesar 4,65 % sebagai tukang , dengan rata-rata penghasilan /bulan sebesar Rp 275.000 dan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 5 orang. Kemudian sebesar 66 % sebagai buruh , dengan rata-rata penghasilan /bulan sebesar Rp 538.000 dan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Berdasarkan pekerjaan penerima Bantuan Langsung Tunai terlihat bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan dengan penghasilan yang tidak tetap dan cenderung rendah dengan tanggungan yang cukup banyak.

Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	23-38	35	40.67
2.	39-54	31	36.06
3.	55-69	17	19.77
4.	66-80	3	3.50
Jumlah		86	100

Berdasarkan table 8 usia responden berkisar antara 23-80 tahun, dimana responden usia 23-38 tahun sebanyak 35 orang (40.67%), responden usia 39-54 tahun sebanyak 31 orang (36.06%). Responden Usia 55-69 sebanyak 17 orang (19.77%) dan responden usia 66-80 sebanyak 7 orang (3.50%).

Tabel 9. Tabel Silang Jenis Pekerjaan, Usia, Rata-rata Penghasilan per Bulan, dan Jumlah Tanggungan

Jenis Pekerjaan		Rata-rata Penghasilan per Bulan		Jumlah Tanggungan Keluarga		Usia				Total
						70,0-85,0	54,5-69,5	39,0-54,0	23,0-38,0	
Buruh	< UMR (Rp691.000)	1	Count	0	2	1	1	4		
			% within Usia	,0%	20,0%	5,9%	4,5%	8,0%		
		2	Count	1	2	7	2	12		
			% within Usia	100,0%	20,0%	41,2%	9,1%	24,0%		
		3	Count	0	3	1	14	18		
			% within Usia	,0%	30,0%	5,9%	63,6%	36,0%		
		4	Count	0	3	5	4	12		
			% within Usia	,0%	30,0%	29,4%	18,2%	24,0%		
		5	Count	0	0	1	1	2		
			% within Usia	,0%	,0%	5,9%	4,5%	4,0%		
	6	Count	0	0	2	0	2			
		% within Usia	,0%	,0%	11,8%	,0%	4,0%			
	Total	Count	1	10	17	22	50			
		% within Usia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	>= UMR (Rp691.000)	2	Count	0	0	0	2	2		
			% within Usia	,0%	,0%	,0%	100,0%	28,6%		
		3	Count	0	0	2	0	2		
			% within Usia	,0%	,0%	66,7%	,0%	28,6%		
		4	Count	0	1	0	0	1		
			% within Usia	,0%	100,0%	,0%	,0%	14,3%		
5		Count	1	0	0	0	1			
		% within Usia	100,0%	,0%	,0%	,0%	14,3%			
6		Count	0	0	1	0	1			
		% within Usia	,0%	,0%	33,3%	,0%	14,3%			
Total	Count	1	1	3	2	7				
	% within Usia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
Pedagang	< UMR (Rp691.000)	1	Count	0	1	1	2	4		
			% within Usia	,0%	33,3%	50,0%	33,3%	33,3%		
		2	Count	1	2	1	1	5		
			% within Usia	100,0%	66,7%	50,0%	16,7%	41,7%		
		3	Count	0	0	0	1	1		
			% within Usia	,0%	,0%	,0%	16,7%	8,3%		
		4	Count	0	0	0	1	1		
	% within Usia		,0%	,0%	,0%	16,7%	8,3%			
	5	Count	0	0	0	1	1			
		% within Usia	,0%	,0%	,0%	16,7%	8,3%			
	Total	Count	1	3	2	6	12			
		% within Usia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
	>= UMR (Rp691.000)	3	Count			0	1	1		
			% within Usia			,0%	100,0%	33,3%		
5		Count			1	0	1			
		% within Usia			50,0%	,0%	33,3%			
7		Count			1	0	1			
		% within Usia			50,0%	,0%	33,3%			
Total		Count			2	1	3			
	% within Usia			100,0%	100,0%	100,0%				
Petani	< UMR (Rp691.000)	3	Count		0	1	0	1		
			% within Usia		,0%	50,0%	,0%	25,0%		
		4	Count		1	1	1	3		
	% within Usia			100,0%	50,0%	100,0%	75,0%			
	Total	Count		1	2	1	4			
		% within Usia		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
>= UMR (Rp691.000)	7	Count		1			1			
		% within Usia		100,0%			100,0%			
	Total	Count		1			1			
Sopir	< UMR (Rp691.000)	2	Count			1		1		
			% within Usia			50,0%		50,0%		
		4	Count			1		1		
	% within Usia				50,0%		50,0%			
	Total	Count			2		2			
% within Usia				100,0%		100,0%				
Tukang	< UMR (Rp691.000)	3	Count		0	0	1	1		
			% within Usia		,0%	,0%	100,0%	25,0%		
		4	Count		0	2	0	2		
			% within Usia		,0%	100,0%	,0%	50,0%		
	8	Count		1	0	0	1			
		% within Usia		100,0%	,0%	,0%	25,0%			
Total	Count		1	2	1	4				
	% within Usia		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
Wiraswasta	< UMR (Rp691.000)	2	Count			1	1	2		
			% within Usia			100,0%	100,0%	100,0%		
		Total	Count			1	1	2		
	>= UMR (Rp691.000)	1	Count				1	1		
			% within Usia				100,0%	100,0%		
Total	Count				1	1				
% within Usia				100,0%	100,0%					

Berdasarkan tabel 9 yaitu Tabel silang antara data Jenis Pekerjaan, Usia, Jumlah Tanggungan, dan Rata- rata Penghasilan per Bulan yang dikelompokan menjadi 2 yaitu:

1 = Berpendapatan < UMR (Rp 691.000)

2 = Berpendapatan >= UMR (Rp 691.000)

dari 86 orang responden penelitian maka dapat dilihat bahwa responden penerima BLT cenderung yang paling banyak yaitu 14 orang atau sebesar 63,6% dari 22 orang responden yang berada pada golongan umur antara 23-38 tahun yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebesar 3 orang dengan rata-rata penghasilan dibawah UMR dan bekerja sebagai buruh.

B. Analisis Berdasarkan Hasil Jawaban Responden

1. Ketepatan Sasaran Penerima BLT

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam petunjuk pendistribusian rumah tangga miskin, merupakan langkah awal untuk menilai apakah program pemberian BLT benar-benar diberikan kepada Rumah tangga Miskin. Untuk melihat apakah dana BLT benar-benar untuk rumah tangga miskin berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Pemenuhan Kebutuhan Makan dalam Sehari

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Kurang dari 2 kali sehari	0	0	0
2	2 kali sehari	74	86	57.36
3	Lebih dari 2 kali	12	14	4.65
Total		86	100	62.01

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 74 responden atau sebanyak 86 % dengan persentase pencapaian sebanyak 57.36 % menyatakan frekuensi makan dalam sehari yaitu 2 kali sehari. Sedangkan sebanyak 12 responden atau sebanyak 14% dengan persentase pencapaian 4.65% menyatakan frekuensi makan dalam sehari yaitu lebih dari 2 kali. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden dapat memenuhi kebutuhan makan dalam sehari yaitu sebanyak 2 kali.

Tabel 11. Pemenuhan Kebutuhan Protein (Daging/Susu/Telur) dalam Seminggu

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek}}{\text{Total Frek}} \times 100\%$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil}}{\text{nilai harapan}} \times 100\%$
1	Tidak Pernah	34	39.5	39.53
2	Satu Kali per Minggu	52	60.5	40.31
3	Lebih dari satu kali/Minggu	0	0	0
Total		86	100	79.84

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 34 responden atau sebanyak 39.5 % dengan persentase pencapaian sebanyak 39.53 % menyatakan tidak pernah memenuhi kebutuhan protein dalam seminggu. Sedangkan sebanyak 52 responden atau sebanyak 60.5 % dengan persentase pencapaian 40.31% dapat memenuhi kebutuhan protein (daging/susu/telur) minimal satu kali per minggu. Hal ini memperlihatkan bahwa. Hali ini memperlihatkan bahwa, pemenuhan kebutuhan protein keluarga miskin dalam seminggu masih kurang terpenuhi, meskipun hanya 1 kali dalam seminggu bisa makan daging/susu/telur. Berarti, pemilihan keluarga sasaran dengan mengacu pada kriteria ini tepat dalam penerimaannya.

Tabel 12. Tabel Silang antara Frekuensi Makan dalam Sehari dan Pemenuhan Kebutuhan Protein Masyarakat

Frek.Makan * Keb.Protein Crosstabulation

			Keb.Protein		Total
			satu kali per Minggu	Tidak pernah	
Frek. Makan	>2 kali sehari	Count	11	1	12
		% of Total	12.9%	1.2%	14.1%
	2 kali sehari	Count	41	32	73
		% of Total	48.2%	37.6%	85.9%
Total		Count	52	33	85
		% of Total	61.2%	38.8%	100.0%

Dari tabel 12 yaitu tabel silang yaitu antara frekuensi makan/hari pemenuhan kebutuhan protein dapat disimpulkan bahwa dari 86 orang responden cenderung yang paling banyak yaitu 41 orang atau sebesar 48,2 % dapat memenuhi kebutuhan protein setidaknya satu kali perminggu dan frekuensi makan dalam sehari sebanyak 2 kali sehari. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memang layak untuk mendapatkan BLT.

Tabel 13. Kebutuhan Mengenai Pembelian Pakaian Baru dalam Setahun

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Ya (tidak mampu)	31	36	36.05
2	Kadang-kadang	55	64	42.65
3	Tidak (mampu membeli)	0	0	0
Total		86	100	78.10

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 31 responden atau sebanyak 36 % dengan persentase pencapaian sebanyak 36.05 % menyatakan ya bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mengenai pembelian pakaian baru dalam setahun terakhir. Sedangkan sebanyak 55 responden atau sebanyak 64% dengan persentase pencapaian 42.65% menyatakan kadang-kadang dapat

memenuhi kebutuhan mengenai pembelian pakaian baru dalam setahun sekali. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden dapat memenuhi kebutuhan dalam pembelian pakaian baru dalam setahun terakhir disaat hari raya tiba meskipun hal itu terjadi kadang-kadang..

Tabel 14. Kesanggupan Keluarga Miskin dalam Menggunakan Fasilitas Kesehatan

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Ya (tidak sanggup)	27	31.4	31.40
2	Kadang-kadang	59	68.6	45.75
3	Tidak (sanggup untuk berobat)	0	0	0
Total		86	100	77.15

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 27 responden atau sebanyak 31.4 % dengan persentase pencapaian sebanyak 31.40 % menyatakan bahwa ya mereka tidak sanggup untuk berobat ke rumah sakit ataupun poliklinik yang menyediakan fasilitas kesehatan. Sedangkan sebanyak 59 responden atau sebanyak 68.6% dengan persentase pencapaian 45.75% menyatakan kadang-kadang sanggup untuk berobat ke rumah sakit ataupun poliklinik yang menyediakan fasilitas kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden masih sanggup membawa keluarga yang sakit untuk berobat ke rumah sakit ataupun poliklinik yang menyediakan fasilitas kesehatan. Mereka hanya sanggup membawa keluarga yang sakit untuk berobat ke puskesmas dengan menggunakan kartu kesehatan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat tersebut berhak untuk menerima bantuan langsung tunai.

Tabel 15. Tabel Silang antara Kemampuan Masyarakat dalam Memenuhi Kebutuhan Pakaian dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan

Pakaian * Kesehatan Crosstabulation

			Kesehatan		Total
			kadang-kadang	Tidak mampu	
Pakaian	kadang-kadang	Count	48	7	55
		% of Total	55.8%	8.1%	64.0%
	Tidak mampu	Count	11	20	31
		% of Total	12.8%	23.3%	36.0%
Total		Count	59	27	86
		% of Total	68.6%	31.4%	100.0%

Dari tabel 15 yaitu tabel silang antara kemampuan masyarakat dalam membeli pakaian baru minimal satu stel setahun terakhirdengan kemampuan dalam fasilitas kesehatan dapat disimpulkan bahwa dari 86 orang responden cenderung yang paling banyak yaitu 48 orang atau sebesar 55,8% kadang-kadang sanggup berobat ke Rumah Sakit atau pun poliklinik yang kadang-kadang pula dapat memenuhi kebutuhan pakaian dalam setahun sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pakaian maupun fasilitas kesehatan walaupun dengan fasilitas sangat minim.

Tabel 16. Ukuran Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Penerima BLT

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Kurang dari 8 m ² /orang	39	45.3	45.35
2	8 m ² per orang	47	54.7	36.40
3	Lebih dari 8 m ² /orang	0	0	0
Total		86	100	81.75

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 39 responden atau sebanyak 45.3 % dengan persentase pencapaian sebanyak 45.35 % menyatakan bahwa ukuran luas lantai bangunan tempat tinggal mereka yaitu kurang dari 8 m² per orang. Sedangkan sebanyak 47 responden atau sebanyak 54.7% dengan persentase pencapaian

36.40% menyatakan menyatakan bahwa ukuran luas lantai bangunan tempat tinggal mereka yaitu sekitar 8 m² per orang. Hal ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden bertempat tinggal dengan ukuran luas lantai kurang atau sekitar 8 m² per orang. Dengan salah satu kriteria penerima BLT tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tersebut berhak mendapatkan BLT dari pemerintah.

Tabel 17. Keadaan Dinding Rumah Tempat Tinggal Penerima BLT

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Masih dari papan/gribig	27	31.4	31.40
2	Bukan dari papan/gribig	59	68.6	45.73
3	Sudah disemen/cat	0	0	0
Total		86	100	77.13

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 27 responden atau sebanyak 31.4 % dengan persentase pencapaian sebanyak 31.40 % menyatakan kondisi dinding rumah tempat tinggal mereka masih dari papan/gribig. Sedangkan sebanyak 59 responden atau sebanyak 68.6% dengan persentase pencapaian 45.73% menyatakan kondisi dinding rumah tempat tinggal mereka bukan dari papan/gribig. Hal ini memperlihatkan bahwa keluarga miskin tersebut termasuk dalam kriteria rumah tangga miskin sebagai sasaran penerima manfaat..

Tabel 18. Tabel Silang antara ukuran luas lantai bangunan tempat tinggal dengan keadaan dinding rumah tempat tinggal

L.Lantai * Dinding Crosstabulation

			Dinding		Total
			Bukan dari papan/gribig	Masih dari papan/gribig	
L.Lantai	8 m per segi/org	Count	31	16	47
		% of Total	36.0%	18.6%	54.7%
	< 8 m per segi/Org	Count	28	11	39
		% of Total	32.6%	12.8%	45.3%
Total		Count	59	27	86
		% of Total	68.6%	31.4%	100.0%

Dari tabel 18 yaitu tabel silang antara ukuran luas lantai bangunan tempat tinggal dengan keadaan dinding rumah tempat tinggal maka dapat disimpulkan bahwa dari 86 responden cenderung yang paling banyak yaitu sebesar 31 atau 36.0% memiliki rumah bukan dari papan atau pun gribig dengan luas lantai rumah sebesar 8 m per segi per orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah memiliki rumah yang layak bukan lagi dari papan atau pun gribig meskipun rumah tersebut tidak begitu besar atau luas.

Tabel 19. Sumber Air Minum Yang Digunakan Berasal Dari Sumur/Sungai

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Ya	37	43	43.02
2	Kadang-kadang	49	57	37.98
3	Tidak	0	0	0
Total		86	100	81.00

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 37 responden atau sebanyak 43 % dengan persentase pencapaian sebanyak 43.02 % menyatakan bahwa sumber air minum yang digunakan berasal dari sumur/sungai. Sedangkan sebanyak 49 responden atau sebanyak 57% dengan persentase pencapaian 37.98% menyatakan

bahwa sumber air minum yang digunakan kadang-kadang berasal dari sumur/sungai. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan atau kadang-kadang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air sumur/sungai. Dengan demikian kebutuhan masyarakat dalam penggunaan air bersih masih kurang, ini menunjukkan bahwa mereka memang pantas untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah.

Tabel 20. Penggunaan Kompor Gas sebagai Alat Untuk Memasak Sehari-hari

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Ya (menggunakan kompor minyak/kayu bakar)	35	40.7	40.69
2	Kadang-kadang	51	59.3	39.55
3	Tidak (menggunakan kompor gas)	0	0	0
Total		86	100	80.24

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 35 responden atau sebanyak 40.7 % dengan persentase pencapaian sebanyak 40.69 % menyatakan ya bahwa mereka tidak menggunakan kompor gas sebagai alat untuk memasak sehari-hari, mereka mengaku menggunakan kompor minyak tanah ataupun masih ada yang menggunakan kayu bakar sebagai alat untuk memasak meskipun pemerintah telah memberikan kompor gas kepada mereka namun mereka masih enggan untuk menggunakannya karena belum terbiasa. Sedangkan sebanyak 51 responden atau sebanyak 59.3% dengan persentase pencapaian 39.55% menyatakan kadang-kadang menggunakan kompor gas sebagai alat untuk memasak sehari-hari, mereka mengaku mendapatkan kompor gas tersebut dari pemerintah yang diperuntukan untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup untuk membeli kompor gas sebagai

alat untuk memasak, walaupun mereka memiliki kompor gas dengan tabung gas ukuran 3 kg yang merupakan pemberian dari pemerintah.

Tabe 21. Tabel Silang Antara Sumber Air Minum Yang Digunakan Apakah Dari Sumur/Sungai Dengan Penggunaan Kompor Gas Sebagai Alat Untuk Memasak Sehari-Hari

Sumb.Air * Al.Masak Crosstabulation

			Al.Masak		Total
			Kadang kadang	Menggunakan Kompor minyak/Kayu bakar	
Sumb.Air	Kadang-kadang	Count	29	20	49
		% of Total	33.7%	23.3%	57.0%
	Ya	Count	22	15	37
		% of Total	25.6%	17.4%	43.0%
Total		Count	51	35	86
		% of Total	59.3%	40.7%	100.0%

Dari table 21 yaitu tabel silang antara sumber air minum yang digunakan apakah dari sumur/sungai dengan penggunaan kompor gas sebagai alat untuk memasak sehari-hari maka dapat disimpulkan bahwa dari 86 orang responden cenderung yang paling banyak yaitu 29 orang atau sebesar 33.7% kadang-kadang menggunakan kompor sebagai alat untuk memasak yang kadang-kadang pula menggunakan air sumur/sungai sebagai sumber air yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden terkecukupi dalam hal pemenuhan sumber air maupun alat yang digunakan untuk memasak sehari-hari.

Tabel 22. Penggunaan Listrik Sebagai Sumber Penerangan di Rumah

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Ya (tidak menggunakan listrik)	0	0	0
2	Kadang-kadang	44	51.2	34.10
3	Tidak (menggunakan listrik)	42	48.8	16.30
Total		86	100	50.40

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 44 responden atau sebanyak 51.2 % dengan persentase pencapaian sebanyak 34.10 % menyatakan terkadang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sedangkan sebanyak 42 responden atau sebanyak 48.8% dengan persentase pencapaian 16.30% menyatakan menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Dilihat dari kriteria ini memang masih kurang tepat, akan tetapi mengingat daerah Way Halim Permai sendiri merupakan daerah yang cukup ramai dan berada di daerah kota Bandar Lampung, Saya kira wajar saja apabila penduduk sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan di rumah walaupun mereka dikategorikan orang yang kurang mampu.

Tabel 23. Pendataan Rumah Tangga Miskin di Luar Wilayah Way Halim Permai

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Ya	38	44.2	44.18
2	Kurang Tahu	48	55.8	37.20
3	Tidak Tahu	0	0	0
Total		86	100	81.38

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 38 responden atau sebanyak 44.2 % dengan persentase pencapaian sebanyak 44.18 % menyatakan bahwa petugas pendata turut mendata rumah tangga miskin di luar wilayah Way Halim Permai . Sedangkan sebanyak 48 responden atau sebanyak 55.8 dengan persentase pencapaian 37.20% menyatakan kurang tahu hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan mereka disibukkan oleh pekerjaan mereka sebagai buruh dan pedagang.

Tabel 24. Kesalahan Pendataan Rumah Tangga Miskin di Luar Wilayah Way Halim Permai

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek}}{\text{Total Frek}} \times 100\%$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil}}{\text{nilai harapan}} \times 100\%$
1	Ya (tidak ada kesalahan)	24	27.9	27.90
2	Kadang-Kadang	62	72.1	48.06
3	Tidak benar (terdapat kesalahan)	0	0	0
Total		86	100	75.96

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 24 responden atau sebanyak 27.9 % dengan persentase pencapaian sebanyak 27.90 % menyatakan ya benar bahwa tidak ada kesalahan pendataan rumah tangga miskin yang berada di luar wilayah Way Halim Permai. Sedangkan sebanyak 62 responden atau sebanyak 72.1% dengan persentase pencapaian 48.06% menyatakan bahwa memang kadang-kadang terjadi kesalahan dalam pendataan rumah tangga miskin yang berada di Wilayah Way Halim Permai khususnya pada pemberian BLT pada tahun 2008 faktor utama terjadi kesalahan tersebut karena singkatnya waktu pendataan oleh petugas.

Matrik hasil analisis data ini untuk mengetahui ketepatan sasaran ditinjau dari kebutuhan makan dalam sehari, pemenuhan kebutuhan protein (daging/susu/telur), pembelian pakaian baru, penggunaan fasilitas kesehatan, ukuran luas lantai rumah, keadaan dinding rumah, sumber air minum, penggunaan alat untuk memasak, penggunaan listrik, pendataan di luar wilayah kelurahan Way Halim Permai, dan kesalahan pendataan di Luar wilayah Way Halim Permai diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 75.05% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Tabel 25. Matrik Analisa Ketepatan Sasaran Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

NO	Variabel dan Item Pertanyaan	Persentase Pencapaian
1	Frekuensi makan dalam sehari	62.01
2	Pemenuhan kebutuhan protein (daging/susu/telur)	79.84
3	Pembelian pakaian baru	78.70
4	Penggunaan fasilitas kesehatan	77.15
5	Ukuran luas lantai rumah	81.75
6	Keadaan dinding rumah	77.13
7	Sumber air minum	81.00
8	Penggunaan alat untuk memasak	80.24
9	Penggunaan Listrik	50.40
10	Pendataan di luar wilayah kelurahan	81.38
11	Kesalahan pendataan di luar wilayah	75.96
RATA-RATA		75.05

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Hal ini menunjukkan bahwa dari 86 orang sampel per KK hampir semua berasal dari keluarga miskin yang berhak menerima BLT dari pemerintah dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program BLT ini berjalan sangat efektif.

2. Ketepatan Jumlah BLT yang diberikan

Tabel 26. Kesesuaian Jumlah Uang yang diberikan dengan Jumlah BLT yang Ditetapkan Pemerintah

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Sesuai	35	40.7	40.69
2	Kurang Sesuai	51	59.3	39.55
3	Tidak Sesuai	0	0	0
Total		86	100	80.24

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 26 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 35 responden atau sebanyak 40.7 % dengan persentase pencapaian sebanyak 40.69 % menyatakan bahwa

sesuainya jumlah uang yang diberikan dengan jumlah BLT yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan sebanyak 51 responden atau sebanyak 59.3% dengan persentase pencapaian 39.55% menyatakan kurang sesuai. Berdasarkan wawancara mengungkapkan terdapat potongan yang sifatnya sukarela untuk pembelian beras RASKIN.

Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai pemotongan Jumlah BLT

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Ya (Tidak Setuju)	46	53.5	53.48
2	Kurang Setuju	40	46.5	31.00
3	Setuju	0	0	0
Total		86	100	84.48

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 27 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 46 responden atau sebanyak 53.5 % dengan persentase pencapaian sebanyak 53.48 % menyatakan bahwa ya mereka tidak setuju dengan adanya pemotongan dana BLT. Sedangkan sebanyak 40 responden atau sebanyak 46.5% dengan persentase pencapaian 31.00% menyatakan kurang setuju dengan adanya pemotongan dana BLT .

Tabel 28. Manfaat BLT Sebagai Alat Pemenuhan Kebutuhan Hidup

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Ya	31	36	36.04
2	Kurang Bermanfaat	54	62.8	41.86
3	Tidak	1	1.2	0.38
Total		86	100	78.28

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 28 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 31 responden atau sebanyak 36 % dengan persentase pencapaian sebanyak 36.04 % menyatakan

bahwa dengan adanya BLT dinilai dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka walaupun hanya dalam tempo sesaat untuk memenuhi kebutuhan mereka berupa kebutuhan pangan atau yang lainnya. Sedangkan sebanyak 54 responden atau sebanyak 62.8% dengan persentase pencapaian 41.86% menyatakan bahwa dengan adanya program BLT ini kurang bermanfaat karena tidak menjamin dengan adanya BLT dapat meningkatkan taraf hidup mereka mengingat harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, walaupun ada itu hanya bersifat sementara.

Tabel 29. Jumlah BLT dibagikan Sama Rata Kepada Penerima

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Ya	37	43	43.02
2	Kadang-kadang	49	57	37.98
3	Tidak	0	0	0
Total		86	100	81.00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 29 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 37 responden atau sebanyak 43 % dengan persentase pencapaian sebanyak 43.02 % menyatakan jumlah BLT dibagikan sama rata kepada setiap rumah tangga miskin yang menerimanya. Sedangkan sebanyak 49 responden atau sebanyak 57% dengan persentase pencapaian 37.98% menyatakan bahwa Jumlah BLT tidak semuanya sama, hal tersebut dikarenakan ada beberapa penerima blt yang memberikan sumbangan BLT yang bersifat sukarela dan untuk keperluan RASKIN. Walaupun hal tersebut tidak harus dilakukan oleh setiap penerima Bantuan Langsung Tunai, karena pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah tanpa

syarat yang artinya penerima BLT bebas menggunakan uang tersebut untuk keperluan mereka.

Tabel 30. Tabel Silang Antara Kesesuaian Jumlah BLT Yang Diberikan Dengan yang Ditetapkan Pemerintah Dengan Jumlah BLT yang Dibagikan Sama Rata Untuk Setiap Penerima

Kes.Jmlah * Pemb.rata Crosstabulation

			Pemb.rata		Total
			Kadang kadang	Ya	
Kes. Jmlah	Kurang sesuai	Count	30	21	51
		% of Total	34.9%	24.4%	59.3%
	Sesuai	Count	19	16	35
		% of Total	22.1%	18.6%	40.7%
Total		Count	49	37	86
		% of Total	57.0%	43.0%	100.0%

Dari tabel 30 yaitu tabel silang antara kesesuaian jumlah BLT yang diberikan dengan yang ditetapkan pemerintah dengan jumlah BLT yang dibagikan sama rata untuk setiap penerima yang diberikan oleh petugas maka dapat disimpulkan bahwa dari 86 responden cenderung yang paling banyak yaitu sebanyak 30 atau 34,9% mengatakan bahwa jumlah BLT yang dibagikan kadang-kadang sama rata yang mengatakan pula bahwa jumlah BLT yang di diberikan dengan jumlah BLT yang ditetapkan kurang sesuai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dana BLT yang diterima masyarakat kurang sesuai.

Tabel 31. Matrik Analisa Mengenai Ketepatan Jumlah Dana BLT yang diterima RTM

NO	Variabel dan Item Pertanyaan	Persentase Pencapaian
1	Kesesuaian jumlah uang yang diberikan	80.24
2	Pemotongan jumlah BLT	84.48
3	Manfaat BLT	78.28
4	Pembagian Jumlah Dana BLT sama rata	81.00
RATA-RATA		81.00

Tabel hasil analisis data ini untuk mengetahui ketepatan jumlah dana BLT yang diterima RTM ditinjau dari aspek kesesuaian jumlah uang yang diberikan, pemotongan jumlah BLT, manfaat BLT untuk memenuhi kebutuhan, pembagian jumlah dana BLT yang diberikan sama rata diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 81.00 yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana BLT yang diberikan sesuai dan dibagikan sama rata untuk semua penerima BLT yaitu rumah tangga miskin dalam pelaksanaan program BLT ini berjalan sangat efektif.

3. Ketepatan Waktu Pendistribusian BLT

Tabel 32. Kesesuaian Waktu dan Proses Penjadwalan atau Pencatatan Mengenai Program BLT dari Pemerintah

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = Jml Frek/ Total Frek x 100%	Persentase Pencapaian = Nilai riil/nilai harapan x 100%
1	Ya	36	41.9	41.86
2	Kurang Sesuai	50	58.1	38.75
3	Tidak Sesuai	0	0	0
Total		86	100	80.61

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 32 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 36 responden atau sebanyak 41.9 % dengan persentase pencapaian sebanyak 41.86 % menyatakan bahwa waktu proses penjadwalan atau pencatatan mengenai program BLT dari pemerintah berjalan sesuai. Sedangkan sebanyak 50 responden atau sebanyak 58.1% dengan persentase pencapaian 38.75% menyatakan kurang sesuai, berdasarkan wawancara hal tersebut dikarenakan singkatnya waktu pendataan dan penjadwalan diakibatkan singkatnya waktu pendataan yang

dilakukan oleh petugas pendata, sehingga pendataan berjalan terburu-buru dan tidak sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan..

Tabel 33. Kesesuaian Waktu Pemberian KKB oleh Petugas

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek}}{\text{Total Frek}} \times 100\%$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan}}{\text{harapan}} \times 100\%$
1	Ya	32	37.2	37.20
2	Kurang Sesuai	53	61.6	41.08
3	Tidak Sesuai	1	1.2	0.38
Total		86	100	78.66

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 33 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 32 responden atau sebanyak 37.2 % dengan persentase pencapaian sebanyak 37.20 % menyatakan waktu pemberian KKB oleh petugas berjalan dengan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sedangkan sebanyak 53 responden atau sebanyak 61.6% dengan persentase pencapaian 41.08% menyatakan pemberian KKB oleh petugas kepada penerima BLT berjalan kurang sesuai.

Tabel 34. Kesesuaian waktu dan Tempat Penyaluran Dana BLT

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek}}{\text{Total Frek}} \times 100\%$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan}}{\text{harapan}} \times 100\%$
1	Ya	32	37.2	37.20
2	Kurang Sesuai	54	62.8	41.86
3	Tidak Sesuai	0	0	0
Total		86	100	79.06

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 25 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 32 responden atau sebanyak 37.2 % dengan persentase pencapaian sebanyak 37.20 % menyatakan adanya kesesuaian waktu dan tempat dalam penyaluran BLT.

Sedangkan sebanyak 54 responden atau sebanyak 62.8% dengan persentase pencapaian 41.86% menyatakan kurang sesuai, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diterima oleh sebagian penerima BLT. Waktu pemberian BLT sesuai dengan yang telah dijadwalkan, sedangkan tempat pemberian BLT di Kelurahan Way Halim Permai telah terorganisir dengan baik oleh PT. Pos Indonesia cabang Way Halim Permai

Tabel 35. Tabel Silang Antara Waktu Pemberian KKB Dengan Waktu Penyaluran Dana BLT

Wak.Pemb.KKB * Wak.Peny.BLT Crosstabulation

			Wak.Peny.BLT		Total
			Kurang sesuai	YA	
Wak. Pemb.KKB	Tidak sesuai	Count	1	0	1
		% of Total	1.2%	.0%	1.2%
	Kurang sesuai	Count	36	17	53
		% of Total	41.9%	19.8%	61.6%
	YA	Count	17	15	32
		% of Total	19.8%	17.4%	37.2%
Total		Count	54	32	86
		% of Total	62.8%	37.2%	100.0%

Dari tabel 35 yaitu tabel silang antara waktu pemberian KKB dengan waktu penyaluran dana BLT . Maka dapat disimpulkan bahwa dari 86 responden cenderung yang paling banyak yaitu sebesar 36 atau 41,9% mengatakan bahwa waktu penyaluran dana BLT kurang sesuai yang mengatakan pula bahwa waktu pemberian KKB kurang sesuai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang tepat yang diterima oleh masyarakat penerima BLT mengenai waktu pemberian KKB meupun pembagian dana BLT.

Tabel 36. Matrik Analisa Mengenai Ketepatan Waktu Distribusi Dana BLT

NO	Variabel dan Item Pertanyaan	Persentase Pencapaian
1	Ketepatan waktu proses penjadwalan dan pencatatan program BLT dari pemerintah	80.61
2	Kesesuaian waktu pemberian KKB	78.66
3	Kesesuaian waktu dan tepat penyaluran dana BLT	79.06
RATA-RATA		79.44

Tabel hasil analisis data ini untuk mengetahui ketepatan waktu pendistribusian BLT ditinjau dari ketepatan waktu proses penjadwalan dan pencatatan, kesesuaian waktu pemberian KKB, dan kesesuaian waktu dan tempat penyaluran dana diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 79.44 yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pendistribusian BLT yang berjalan sesuai dan tepat waktu dalam pelaksanaan program BLT ini berjalan sangat efektif.

4. Sosialisasi Program BLT

Tabel 37. Sosialisasi mengenai Informasi Program BLT kepada Rumah Tangga Miskin oleh Pihak Kelurahan

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek}}{\text{Total Frek}} \times 100\%$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil}}{\text{nilai harapan}} \times 100\%$
1	Ya	39	45.3	45.34
2	Kurang Tahu	46	53.5	25.65
3	Tidak Tahu	1	1.2	0.38
Total		86	100	81.37

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 37 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 39 responden atau sebanyak 45.3 % dengan persentase pencapaian sebanyak 45.34 % menyatakan benar pihak kelurahan menginformasikan program BLT kepada rumah

tangga miskin, hal tersebut menggambarkan bahwa benar pihak kelurahan telah menginformasikan dan mensosialisasikan tentang program BLT kepada masyarakat. Sedangkan sebanyak 46 responden atau sebanyak 53.5% dengan persentase pencapaian 25.65% menyatakan kurang tahu mengenai informasi yang diberikan oleh kelurahan, mereka mendapatkan informasi tersebut dari surat kabar, televisi, dan berita dari warga yang menginformasikan mengenai program tersebut. Kurangnya informasi tersebut dikarenakan mereka disibukan oleh pekerjaan mereka yaitu sebagai pedagang, buruh, atau pun yang lainnya.

Tabel 38. Musyawarah Oleh Kelurahan Kepada Masyarakat untuk Mengecek Ketepatan Nama-Nama RTM yang ada pada BPS

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Selalu	35	40.7	40.69
2	Kadang-Kadang	49	57	37.98
3	Tidak Pernah	2	2.3	0.78
Total		86	100	79.45

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 38 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 35 responden atau sebanyak 40.7 % dengan persentase pencapaian sebanyak 40.69% menyatakan bahwa kelurahan selalu memusyawarahkan kepada masyarakat untuk mengecek ketepatan nama-nama RTM yang ada pada BPS.. Sedangkan sebanyak 49 responden atau sebanyak 57% dengan persentase pencapaian 47.98% menyatakan kelurahan kadang-kadang melakukan musyawarah untuk mengecek ketepatan nama-nama RTM yang ada pada BPS.

Tabel 39. Pengumuman Daftar Nama Penerima BLT oleh Pihak Kelurahan

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek/ Total Frek} \times 100\%}{}$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan} \times 100\%}{}$
1	Ya	32	37.2	37.20
2	Kurang Tahu	54	62.8	41.86
3	Tidak Tahu	0	0	0
Total		86	100	79.06

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 39 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 32 responden atau sebanyak 37.2 % dengan persentase pencapaian sebanyak 37.20 % menyatakan bahwa nama mereka selalu tercantum dalam daftar nama penerima BLT yang diumumkan oleh pemerintah. Sedangkan sebanyak 54 responden atau sebanyak 62.8% dengan persentase pencapaian 41.86% menjawab kurang tahu. Dan tidak ada responden yang menyatakan namanya tidak terdaftar.

Tabel 40. Tabel Silang Antara Musyawarah Kelurahan Kepada Masyarakat Untuk Mengecek Ketepatan RTS Yang Ada Pada BPS Dengan Daftar Nama Yang Tercantum Dalam Pengumuman Oleh Pihak Kelurahan

Musy.Kelurahan * Daft.Penerima Crosstabulation

			Daft.Penerima		Total
			Kurang tahu	Ya	
Musy.Kelurahan	Tidak pernah	Count	1	1	2
		% of Total	1.2%	1.2%	2.3%
	Kadang-kadang	Count	39	10	49
		% of Total	45.3%	11.6%	57.0%
	Selalu	Count	14	21	35
		% of Total	16.3%	24.4%	40.7%
Total		Count	54	32	86
		% of Total	62.8%	37.2%	100.0%

Dari tabel 40 yaitu tabel silang antara musyawarah kelurahan kepada masyarakat untuk mengecek ketepatan RTS yang ada pada BPS dengan daftar nama yang tercantum dalam pengumuman oleh pihak kelurahan maka dapat disimpulkan dari 86 responden cenderung yang paling banyak yaitu sebesar 39 atau 45,3%

mengatakan bahwa kurang tahu apakah kelurahan melakukan musyawarah untuk mengecek ketepatan nama-nama RTS yang ada pada BPS yang juga mengatakan kurang tahu apakah namanya tercantum dalam daftar penerima yang diumumkan kelurahan. Hal tersebut menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat kurang mendapat informasi ataupun sosialisasi dari pihak kelurahan.

Tabel 41. Penyediaan Fasilitas Kotak Pos sebagai bentuk Pengaduan dari Pelaksanaan Pembayaran Dana BLT

No	Alternatif Jawaban	Frek.	(%) = $\frac{\text{Jml Frek}}{\text{Total Frek}} \times 100\%$	Persentase Pencapaian = $\frac{\text{Nilai riil/nilai harapan}}{\text{harapan}} \times 100\%$
1	Ya	30	34.9	34.89
2	Kurang Tahu	56	65.1	43.41
3	Tidak Tahu	0	0	0
Total		86	100	78.3

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Berdasarkan tabel 41 dapat diketahui, bahwa dari 86 responden, 30 responden atau sebanyak 34.9 % dengan persentase pencapaian sebanyak 34.89 % menyatakan bahwa benar PT POS menyediakan fasilitas kotak pos (PO BOX) sebagai bentuk pengaduan dari pelaksanaan pembayaran dana BLT. Sedangkan sebanyak 56 responden atau sebanyak 65.1% dengan persentase pencapaian 43.41% menyatakan bahwa mereka kurang tahu bahwa PT POS menyediakan fasilitas kotak pos (PO BOX) sebagai bentuk pengaduan dari pelaksanaan pembayaran dana BLT, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang mereka dapatkan meskipun petugas telah mengumumkannya.

Tabel 42. Matrik Analisa Mengenai Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai

NO	Variabel dan Item Pertanyaan	Persentase Pencapaian
1	Informasi dan Sosialisasi program BLT	91.37
2	Pengecekan ketepatan nama-nama RTS yang ada pada BPS	79.45
3	Daftar nama penerima BLT	79.06
4	Penyediaan fasilitas kotak Pos (PO BOX)	78.3
RATA-RATA		82.04

Tabel hasil analisis data ini untuk mengetahui sosialisasi program BLT ditinjau dari aspek informasi dan sosialisasi program BLT, musyawarah untuk pengecekan ketepatan nama-nama RTS, pencantuman daftar nama penerima BLT, dan penyediaan fasilitas kotak Pos (PO BOX) diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 83.04 yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi program BLT terhadap rumah tangga miskin dalam pelaksanaan berjalan dengan sangat baik.

B. Analisis Data dan Pengujian

Tabel 43. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dilihat dari Ketepatan Sasaran, Ketepatan Jumlah dan Ketepatan Waktu.

NO	Variabel dan Item Pertanyaan	Persentase Pencapaian
A	Ketepatan Sasaran Penerima BLT	
1	Frekuensi makan dalam sehari	62.01
2	Pemenuhan kebutuhan protein (daging/susu/telur)	79.84
3	Pembelian pakaian baru	78.70
4	Penggunaan fasilitas kesehatan	77.15
5	Ukuran luas lantai rumah	81.75
6	Keadaan dinding rumah	77.13
7	Sumber air minum	81.00
8	Penggunaan alat untuk memasak	80.24
9	Penggunaan Listrik	50.40
10	Pendataan di luar wilayah kelurahan Way Halim Permai	81.38
11	Kesalahan pendataan di luar wilayah Way Halim Permai	75.96
RATA-RATA		75.05
B	Ketepatan Jumlah Dana BLT	Persentase Pencapaian
1	Kesesuaian jumlah uang yang diberikan	80.24
2	Pemotongan jumlah BLT	84.48
3	Manfaat BLT	78.28
4	Pembagian Jumlah Dana BLT sama rata	81.00
RATA-RATA		81.00
C	Ketepatan Waktu Pendistribusian	Persentase Pencapaian
1	Ketepatan waktu proses penjadwalan dan pencatatan program BLT dari pemerintah	80.61
2	Kesesuaian waktu pemberian KKB	78.66
3	Kesesuaian waktu dan tepat penyaluran dana BLT	79.06
RATA-RATA		79.44
TOTAL RATA-RATA		78.49

Kaidah keputusan :

- 75 – 100 = Sangat Efektif
- 50 – 74 = Efektif
- 24 – 49 = Kurang Efektif
- 0 – 24 = Tidak Efektif

Matrik hasil analisis data untuk mengetahui ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu pendistribusian yang didapatkan dalam pelaksanaan program BLT jika kita urutkan dari 3 (tiga) aspek yang ada, maka didapatkan hasil yang pertama adalah aspek ketepatan sasaran dengan persentase pencapaian 75.05%, kedua aspek ketepatan jumlah dengan persentase pencapaian 81.00 dan yang ketiga berdasarkan aspek ketepatan waktu pendistribusian dengan persentase pencapaian sebesar 81.00

Secara keseluruhan matrik analisis efektivitas pelaksanaan program BLT yang dilihat dari ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu rata-ratanya adalah sebesar 78.49% yang termasuk kategori sangat efektif.

C. Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Bantuan Lansung Tunai (BLT)

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan mengenai efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Way Halim Permai berjalan dengan sangat baik, dan apabila dibandingkan dengan asumsi awal peneliti yang menilai penyaluran BLT di Kelurahan way Halim Permai tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Asumsi peneliti dan masyarakat di Kelurahan way halim Permai tidak tepat sasaran dikarenakan beberapa hal, diantaranya penilaian peneliti dan masyarakat yang menyatakan penyaluran BLT di Way Halim Permai tidak tepat karena mayoritas warga di daerah tersebut tergolong warga yang mampu,

berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan walaupun memang benar di daerah tersebut banyak orang yang kehidupannya cukup mapan atau tergolong keluarga yang memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi, akan tetapi ternyata di daerah tersebut masih cukup banyak warga miskin atau pun kurang mampu terbukti dari hasil

penyebaran kuisioner dan hasil pantauan ternyata mereka memang layak untuk mendapatkan dana BLT dari pemerintah. Kemudian penilaian masyarakat yang menyatakan penyaluran BLT tidak tepat sasaran dikarenakan tidak benarnya informasi yang diterima masyarakat. Adanya gosip yang beredar dari satu warga ke warga lainnya hingga berita yang beredar tidak benar adanya, hal ini yang menimbulkan dugaan yang buruk dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kurangnya Informasi yang diberikan kepada warga, hingga pengetahuan yang diperoleh warga kurang berkenan dengan apa yang telah direncanakan pemerintah mengenai pemberian BLT serta harus dilengkapinya beberapa kriteria yang harus dipenuhi warga untuk menerima BLT.

Kemudian mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdata di Kelurahan Way Halim Permai yang bukan termasuk warga daerah tersebut, faktor utama yang menyebabkan hal tersebut karena pendataan yang terburu-buru baik disengaja atau pun tidak sehingga data yang diperoleh tidak akurat, yang harus terus dilakukan perbaikan – perbaikan agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Mengenai ketidak sesuaian jumlah BLT yang diberikan, dari hasil penelitian secara keseluruhan bahwa tidak benar adanya pemotongan dana BLT, apabila tidak ada kesesuaian antara jumlah BLT yang diterima masyarakat hal tersebut dikarenakan sumbangan sukarela ataupun sebagai bentuk pembayaran untuk penebusan raskin yang akan diperoleh mereka nantinya. Kemudian dari 86 responden sebanyak 62.8% responden mengaku bahwa BLT yang mereka terima sebesar Rp. 100.000 per bulan selama 7 bulan pada tahun 2008, dan sebesar Rp 100.000 per bulan selama 2 bulan pada tahun 2009 manfaatnya kurang dirasakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya harga kebutuhan pokok yang

meningkat, oleh karena itu mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga serta program BLT ini tidak melihat jumlah tanggungan setiap keluarga RTM sehingga untuk jumlah tanggungan yang banyak mereka tidak dapat meningkatkan taraf hidup hidupnya.

D. Pembahasan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan melarat dan ketidak beruntungan yaitu suatu keadaan minus (*deprivation*) hal tersebut berkaitan dengan minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Salah satu peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah peran distribusi, yang mana di dalam peran ini mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kelompok warga miskin dengan pemberian subsidi. Menyangkut peran distribusi ini salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan subsidi.

Subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil. Subsidi juga merupakan salah satu pengeluaran rutin pemerintah yang ditunjukkan untuk membiayai kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah.

Salah satu program subsidi bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compenstory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*) adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Konsep kemiskinan terkait dengan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk makanan maupun non-makanan. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Program Bantuan Langsung Tunai ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Ada yang berpendapat bahwa Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran bersifat *charity* dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belas kasihan Pemerintah serta secara ekonomi mikro menumbuhkan budaya konsumtif sesaat, karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh Pemerintah (*unconditional cash transfer*). Namun pada sisi lain

Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan social (*social protection*) bagi masyarakat miskin.

Baik masyarakat maupun pemerintah berharap agar realisasi program BLT dapat berjalan dengan efektif, sistematis, lancar, berhasil, dan tepat sasaran. Efektivitas sendiri merupakan landasan untuk mencapai sukses, efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Secara umum efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Efektivitas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan suatu keberhasilan suatu program atau rencana. Dalam penelitian ini efektivitas di ukur dengan melihat 3 aspek yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran/pendistribusian.

Namun demikian, ternyata realisasi dan realitas program BLT masih terdapat kendala-kendala, persoalan-persoalan bahkan kekurangan-kekurangan. Beberapa contoh kendala-kendala yang ditemukan dari hasil penelitian khususnya di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame adalah pendataan yang belum sepenuhnya akurat seperti masih ada pendataan yang terjadi di luar wilayah kelurahan Way Halim Permai maupun penerima Bantuan Langsung Tunai yang kurang sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah, faktor utama yang menyebabkan hal tersebut karena pendataan yang terburu-buru baik disengaja atau pun tidak sehingga data yang diperoleh tidak akurat, yang harus terus dilakukan perbaikan – perbaikan agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Kemudian dari 86 responden sebanyak 62.8% responden mengaku bahwa BLT yang mereka terima sebesar Rp.

100.000 per bulan selama 7 bulan pada tahun 2008, dan sebesar Rp 100.000 per bulan selama 2 bulan pada tahun 2009 manfaatnya kurang dirasakan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya harga kebutuhan pokok yang meningkat, oleh karena itu mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga serta program BLT ini tidak melihat jumlah tanggungan setiap keluarga RTM sehingga untuk jumlah tanggungan yang banyak mereka tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya. Mereka berharap untuk menjadikan dana BLT sebagai modal usaha, akan tetapi mereka bingung dengan anggaran sebesar itu usaha apa yang bisa mereka lakukan dan jumlahnya juga tidak cukup untuk biaya sekolah hingga memenuhi kebutuhan pangan sekeluarga.

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan meskipun masih ada beberapa kendala seperti yang telah dijelaskan diatas, efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai di Kelurahan Way Halim Permai berjalan sangat baik. Dari matrik hasil analisis data untuk mengetahui ketepatan sasaran ditinjau dari kebutuhan makan dalam sehari, pemenuhan kebutuhan protein (daging/susu/telur), pembelian pakaian baru, penggunaan fasilitas kesehatan,

ukuran luas lantai rumah, keadaan dinding rumah, sumber air minum, penggunaan alat untuk memasak, penggunaan listrik, pendataan di luar wilayah kelurahan Way Halim Permai, dan kesalahan pendataan di Luar wilayah Way Halim Permai diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 75.05%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 86 orang sampel per KK hampir semua berasal dari keluarga miskin yang berhak menerima BLT dari pemerintah dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program BLT ini berjalan sangat efektif.

Kemudian dari hasil analisis data ini untuk mengetahui ketepatan jumlah dana BLT yang diterima RTM ditinjau dari aspek kesesuaian jumlah uang yang diberikan, pemotongan jumlah BLT, manfaat BLT untuk memenuhi kebutuhan, pembagian jumlah dana BLT yang diberikan sama rata diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 81.00 yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana BLT yang diberikan sesuai dan dibagikan sama rata untuk semua penerima BLT yaitu rumah tangga miskin dalam pelaksanaan program BLT ini berjalan sangat efektif. Dan dari hasil analisis data ini untuk mengetahui ketepatan waktu pendistribusian BLT ditinjau dari ketepatan waktu proses penjadwalan dan pencatatan, kesesuaian waktu pemberian KKB, dan kesesuaian waktu dan tempat penyaluran dana diperoleh rata-rata persentase pencapaian sebesar 79.44 yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pendistribusian BLT yang berjalan sesuai dan tepat waktu dalam pelaksanaan program BLT ini berjalan sangat efektif.

Dengan demikian secara keseluruhan efektivitas penyaluran program bantuan langsung tunai dilihat dari tiga aspek yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu didapatkan rata-rata persentase pencapaian sebesar 78.49% yang termasuk dalam kategori sangat efektif.

Dengan diketahuinya program penyaluran BLT ini telah terlaksana secara efektif, setidaknya telah dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Kelurahan Way Halim Permai telah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Walaupun masih ada sedikit hambatan-hambatan yang harus diperbaiki baik dalam pendataan ataupun mekanisme penyalurannya. Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat di

Kelurahan Way Halim Permai walaupun tidak semua masyarakat mengatakan BLT bermanfaat akan tetapi hampir sebagian mengaku senang dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai yang diperuntukan untuk masyarakat terutama dari golongan masyarakat miskin, apalagi di saat kondisi dimana harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini sangat membantu dalam peningkatan daya beli masyarakat khususnya di daerah Way Halim Permai sendiri.

Dalam pencapaian tujuan pelaksanaan Program bantuan langsung tunai agar terus dapat ditingkatkan penting sekali jika semua pihak dari pusat sampai desa/kelurahan bersama-sama masyarakat turut mendukung dan menyukseskan pelaksanaan di lapangan. Hal ini harus dilakukan agar apa yang menjadi tujuan utama dari program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan mengenai pelaksanaan Program BLT maka dapat disimpulkan :

1. Dilihat dari ketepatan sasaran penerima BLT bahwa telah berjalan sangat efektif dengan persentase pencapaian sebesar 75.05%, hal tersebut ditinjau dari kebutuhan makan dalam sehari, pemenuhan kebutuhan protein (daging/susu/telur), pembelian pakaian baru, penggunaan fasilitas kesehatan, ukuran luas lantai rumah, keadaan dinding rumah, sumber air minum, penggunaan alat untuk memasak, penggunaan listrik, pendataan di luar wilayah kelurahan Way Halim Permai, dan kesalahan pendataan di Luar wilayah Way Halim Permai.
2. Menurut ketepatan jumlah dana BLT yang diterima RTM dalam pelaksanaannya telah berjalan sangat efektif dengan persentase pencapaian sebesar 81.00% yang ditinjau dari aspek kesesuaian jumlah uang yang diberikan, pemotongan jumlah BLT, manfaat BLT untuk memenuhi kebutuhan, pembagian jumlah dana BLT yang diberikan sama rata.
3. Kemudian dilihat dari ketepatan waktu pendistribusian BLT maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya berjalan sangat efektif dengan persentase

pencapaian sebesar 79.44% yang ditinjau dari ketepatan waktu proses penjadwalan dan pencatatan, kesesuaian waktu pemberian KKB, dan kesesuaian waktu dan tempat penyaluran.

4. Dari ketiga aspek yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran program BLT di Kelurahan Way Halim Permai pada tahun 2008/2009 berjalan sangat efektif, dengan rata-rata persentase pencapaian sebesar 78.49%.

B. Saran

1. Dalam pendataan, sebaiknya orang-orang yang terdata benar-benar merupakan rumah tangga miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makanan dan non makanan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga kepercayaan masyarakat akan peran kelurahan akan dinilai baik dan memberikan nilai yang positif yang diharapkan dapat dicontoh oleh kelurahan-kelurahan lainnya.
2. Agar tidak terjadi kesalahan pendataan di luar Wilayah Way Halim Permai maka harus dilakukan pendataan ulang dengan tidak terburu-buru dan mengacu pada kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan, hal ini menghindari masyarakat miskin yang menerima BLT dari kelurahan Way Halim Permai yang bukan termasuk warga tersebut terdata di dua tempat yang berbeda.
3. Mengenai manfaat Bantuan Langsung Tunai yang kurang dirasakan oleh sebagian masyarakat, penulis menyarankan agar masyarakat tidak boros dengan menghabiskan dana BLT yang diberikan pemerintah untuk kebutuhan

yang tidak begitu mendesak, sebaiknya pemakaian dana BLT hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja seperti kebutuhan makanan dan pakaian seperlunya saja tidak berlebihan. Dan kepada pemerintah hendaknya memperhatikan jumlah tanggungan dari masing-masing penerima, sehingga pemberian dana BLT ini dapat diberikan secara adil dan merata sesuai dengan kondisi perekonomian mereka.

4. Dengan adanya penelitian Skripsi ini, diharapkan dugaan-dugaan ataupun asumsi-asumsi masyarakat yang buruk mengenai pelaksanaan BLT di Kelurahan Way Halim Permai ini dapat terjawab, dan untuk ke depannya dengan melihat permasalahan-permasalahan yang muncul seputar penyaluran BLT tersebut, dan adanya penolakan dari sebagian pihak masyarakat yang menganggap bantuan ini tidak mampu mengangkat kemampuan ekonomi, maka penulis menyarankan sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan dan mengutamakan program-program lain yang dapat menyejahterakan masyarakat dan lebih bersifat produktif seperti PNPM Mandiri, pemberian KUR terhadap masyarakat, atau pun program-program lain yang bersifat pemberian modal usaha bukan pemberian uang secara cuma-cuma.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- BPS. 2007. *Analisis Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007*. Badan Pusat Statistik Jakarta
- Djayasinga, Marselina. 2006. *Ekonomi Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis*. PT. Grafindo Media Pratama. Jakarta
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1993. *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame. 2007. *Monografi Desa*. Bandar Lampung.
- Mangkusoebroto, Guritno. 2002. *Ekonomi Publik*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo, MBA,AK. 2003. *Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Musgrave A. Richard dan Musgrave B. Peggy, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta.

Nairobi, dkk. 2003. *Peluang Investasi Produk Unggulan di Provinsi Lampung*. Penerbit Bank Indonesia dan FE Unila. Bandar Lampung.

Nazir.M, 2003. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung

Suparmoko,M. Tahun 2000. *Ekonomi Publik (untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Suparmoko,M. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5. BPFE Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Grafindo Media Pratama. Jakarta

Tim Penyusun Juknis Penyaluran BLT. 2008. *Petunjuk Teknis Penyaluran BLT*. Departemen Sosial RI. Jakarta

Unila.2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Unila. Bandar Lampung.

www.Google.com

LAMPIRAN